

SERI PENERBITAN
FORUM ARKEOLOGI
ISSN 0854-3232



Pengelolaan Sumber Daya
Arkeologi

BALAI ARKEOLOGI DENPASAR

Budaya Kubur Prasejarah di Desa Hu'u, Dompu, NTB

Purusa M.

I. Pendahuluan

Dilatar belakangnya temuan arkeologis di situs Nangasia pada bulan Juni 2003, maka dilanjutkan dengan pengamatan lingkungan yang lebih luas, terhadap temuan-temuan lain di Desa Hu'u ini. Desa Hu'u adalah salah satu desa yang banyak menyimpan tinggalan-tinggalan arkeologis baik berupa artefak maupun budaya tingkah laku sehari-hari yang diwarisi dari suatu tradisi sebelumnya. Suatu tradisi yang berkelanjutan yang diyakini oleh mereka dapat membawa keselamatan untuk individu maupun desa.

Desa Hu'u dapat dicapai dengan kendaraan roda empat kira-kira berjarak 44 Km ke arah selatan dari Kota Kabupaten Dompu. Dari beberapa situs yang diamati pada kesempatan ini, dicoba untuk membicarakan salah satu dari temuan tersebut. Temuan arkeologis berupa kubur prasejarah yang berlokasi di Desa Hu'u Lama. Kubur prasejarah ini secara umum dikenal dengan sebutan "kubur duduk". Penamaan ini mungkin diartikan bahwa orang yang dikubur di dalam sebuah susunan batu andesit yang melingkar dan pada bagian atas ditutup dengan batu besar ditempatkan dengan posisi duduk atau hal-hal lain yang memberikan tanda-tanda yang lebih mendekati. Lokasi situs ini oleh masyarakat dikenal dengan sebutan Desa Hu'u Lama, yang oleh masyarakat dianggap sebagai desa yang pertama, sebelum Desa Hu'u yang sekarang dan sekaligus dianggap sebagai cikal bakal leluhur mereka. Situs ini dianggap keramat dan tradisi kubur ini sudah tidak



berlanjut lagi. Lokasi situs ini tepatnya terletak di lereng Gunung "Doro Manto". Situs ini disebut "Oi Busi" yang artinya "air dingin", mungkin nama ini diberikan sehubungan dengan adanya sumber mata air yang mengalir sangat dingin. Pengamatan di lapangan yang sempat kami lakukan walaupun dalam waktu yang relatif singkat, kami coba mengklasifikasi menjadi beberapa kelompok. Cara ini kami lakukan tiada lain untuk mempermudah di dalam memberikan klasifikasi dalam penterapan metode lapangan. Keadaan situs secara umum dalam keadaan rusak, mungkin sengaja dirusak oleh orang-orang yang ingin tahu isi kuburan tersebut atau mempunyai maksud lain untuk mencari harta karun. Keadaan lingkungan penuh dengan semak belukar sehingga untuk melihat situs ini harus menebang semak-semak dan tampaknya situs ini terlantar. Hal seperti ini terjadi mungkin disebabkan tempat ini tidak berfungsi lagi sebagai tempat penguburan karena jauh dari aktivitas kampung, atau tradisi ini sudah tidak ada lagi. Beberapa kubur kelihatan sudah dirusak orang. Secara fisik kalau kita melihat kubur di situs "Oi Busi" ini diperkirakan berasal dari masa prasejarah dari tradisi yang cukup tua. Berdasarkan peninggalan arkeologis dapat diduga bahwa di tempat ini pernah terjadi aktivitas manusia yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Dari artefak kubur yang didapatkan tentu muncul pertanyaan, di mana pemukiman pendukung kebudayaan ini? Di dalam pengamatan terhadap kubur selalu akan muncul pertanyaan yang sama dan sulit untuk mendapatkan jawaban yang memadai. Situs "Oi Busi" merupakan suatu objek arkeologis yang sangat penting dan merupakan untaian budaya-budaya yang pernah ada di Nusantara ini. Situs kubur semacam ini pernah ditemukan di Daerah Donggo (Bima, NTB). (Bintarti, 1982), dan dilaporkan oleh peneliti arkeologi tahun 1982.

Di dalam kehidupan manusia, masalah kematian mendapat tempat yang sangat penting di lubuk hati kehidupan umat manusia yang mengandung unsur-unsur sedih dan kewajiban-kewajiban yang dilakukan sebaik-baiknya terhadap orang yang meninggalkan terlebih dahulu, apalagi orang yang meninggal itu adalah orang penting dan mempunyai kedudukan yang penting pula di dalam kehidupan masyarakat. Kejadian ini membawa kepada

perilaku-perilaku yang dihasilkan dengan mempergunakan/menghasilkan artefak budaya yang istimewa pula. Suatu contoh penggunaan sarkofagus pada sarana kematian, mempunyai arti tersendiri di tengah-tengah kehidupan masyarakat pada waktu itu. Suatu perilaku yang sangat istimewa pada waktu itu, disebabkan karena orang yang telah meninggal mempunyai peranan yang penting menjadi penghulu, pemuka masyarakat (kepala suku dan sebagainya), di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Artefak budaya yang dihasilkan oleh pendukung budaya ini merupakan simbol kekerabatan/golongan tertentu untuk dapat mempergunakan sarkofagus sebagai tempat penguburan. Umpamanya pada waktu ia masih hidup dianggap sebagai kepala suku atau orang yang sangat berkuasa di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga pada waktu matinya pun mendapat perlakuan yang khusus pula (Soejono, 1977).

Budaya-budaya seperti ini dilahirkan oleh suatu budaya yang berakar dari masa megalitik. Penggunaan sarkofagus sebagai wadah kubur mengingatkan kita pada budaya-budaya yang berasal dari daerah seberang yang kemudian sampai ke Indonesia. Tampaknya pada suatu periodisasi budaya di masa lampau adanya penyebaran budaya dari Asia daratan ke Asia Tenggara sampai ke daerah-daerah Pasifik. Budaya megalitik ini ditampakkan oleh suatu masa di mana manusia sudah benar-benar hidup menetap. Pada perkembangan belakangan dikenal dengan sebutan budaya asli, artinya belum mendapat pengaruh Hindu-Budha. Konsep-konsep yang melandasi kepercayaan ini, tidak lain adanya anggapan bahwa alam semesta didiami oleh makhluk-makhluk halus atau roh-roh. Kepercayaan semacam ini melahirkan anggapan bahwa alam dengan segala isinya dianggap mempunyai kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan manusia yang dikenal dengan istilah "Adi Kodrat" (Koentjaraningrat, 1958 : 1962). Pada masa ini pemujaan leluhur sangat diperhatikan dan mendapat posisi yang cukup penting. Pemujaan roh leluhur dilatarbelakangi oleh kepercayaan bahwa selain berhubungan dengan manusia yang ada di dunia ini, roh juga berhubungan dengan roh-roh yang lain. Gagasan kepercayaan semacam ini terutama ada pada kebudayaan masyarakat yang menganggap roh selalu

pergi dan berada di alam roh (Koentjaraningrat, 1977 : 236). Apa yang kami utarakan ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembuatan wadah kubur sarkofagus yang bertujuan ingin memulyakan/berbuat sebaik-baiknya terhadap leluhur.

Di dalam budaya kubur melahirkan berbagai tata cara dan berbagai artefak kubur yang sampai kepada kita sekarang, tentu sesuai pula dengan periodisasi budaya yang dilahirkan oleh setiap pendukungnya. Salah satu budaya kubur kita temukan di Desa Hu'u ini dengan istilah sementara "kubur duduk" apa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi sehingga menghasilkan kubur-kubur yang disebutkan di atas.

Pengamatan lebih jauh untuk memudahkan pendataan "kubur duduk" ini, kami coba untuk membagi ke dalam dua kelompok kubur. Kelompok kubur I terletak di Desa Hu'u Lama, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu. Situs ini terletak di pinggir timur sungai Hu'u. Sungai Hu'u yang besar ini tampaknya menyimpan alat-alat batu, hasil dari suatu peradaban manusia yang lebih tua dari budaya kubur yang sedang kami paparkan ini. Permasalahan alat-alat batu hasil manusia masa lampau tersebut akan dibicarakan pada kesempatan yang lain dan secara khusus.

"Kubur duduk" pada kelompok I terletak di bawah pohon kelapa dan sudah banyak yang terganggu, tampaknya bukan karena kejadian alam, namun perkiraan kami dirusak oleh orang-orang yang ingin tahu atau orang-orang yang mencari harta karun. Salah satu "kubur duduk" yang dirusak, sempat kami amati berada di tengah semak-semak dalam keadaan batu tutupnya sudah tergeser, lubang kubur dalam keadaan kosong yang tertinggal hanya susunan batu andesit berbentuk silinder masih tersusun rapi. Di hari kemudian diharapkan para peneliti menemukan kubur yang dalam keadaan utuh, tentu akan dipilih kubur-kubur yang tampaknya belum terganggu, temuan ini sangat penting. Dari "kubur duduk" kelompok I menuju arah timur melalui selokan kecil berair dingin, sampailah pada tanah milik Pak Bustan yang dikatakan luasnya 5.600 M². Di kelompok II ini, kami coba menghitungnya secara kasar sementara berada pada jumlah hitungan 8 (delapan). "Kubur duduk" di kelompok I dan II mempunyai

bentuk dan bahan yang dipakainya sama. Tentu di tengah-tengah kesamaan itu ada perbedaan yaitu ukuran masing-masing kubur baik itu menyangkut tutup dan besar ukurannya. Pada pengamatan pertama ini dicoba untuk menggali satu kubur yang menurut si empunya tanah belum terganggu, hasilnya cukup memuaskan. “Kubur duduk” II berada di tengah semak-semak seperti tidak pernah ada suatu aktivitas. Misteri “kubur duduk” yang menjadi salah satu kegiatan penelitian arkeologi di situs Dompu ini sangat perlu diadakan lagi dengan perhitungan waktu yang lebih panjang lagi. Tujuan utama penelitian ini tiada lain untuk memberikan wawasan yang lebih luas lagi tentang sistem-sistem kubur pada suatu periodisasi budaya masa lampau. Dalam hal ini khususnya ingin dibuktikan apakah penamaan “kubur duduk” oleh masyarakat sudah tepat, bahwa mayat diletakkan di liang lahat dengan posisi duduk. Masih banyak lagi yang harus diketahui pada budaya kubur ini, seperti bekal kubur yang disertakan, maupun berapa individu yang disertakan diletakkan pada liang lahat itu.

Mudah-mudahan penulisan awal ini akan memberikan data yang cukup penting dan berguna untuk kepentingan arkeologi dan menjadi suatu kebanggaan bagi masyarakat setempat, bahwa mereka memiliki budaya lama yang selama ini mereka belum banyak mengetahuinya. Semoga kerja sama penelitian ini akan membuahkan hasil yang diharapkan.

II. Pembahasan

Di dalam pembahasan tulisan ini sementara masih mempergunakan penamaan “kubur duduk”, sampai ditemukannya data-data baru mengenai budaya ini. “Kubur duduk” yang kami kelompokkan di atas, sebenarnya merupakan satu kesatuan budaya yang sama. Seperti yang telah kami utarakan di atas, pengelompokkan tersebut sifatnya sementara untuk memudahkan pencatatan temuan ataukah benar-benar merupakan pengelompokkan berdasarkan data yang diperoleh di situs tersebut. Suatu contoh kelompok II terletak pada tanah yang lebih tinggi, apakah ada maksud-maksud tertentu untuk mendekatkan diri dengan leluhur yang

bersemayam di puncak gunung. Situasi seperti ini dapat memberi nuansa yang berbeda dengan kubur yang berada di tanah yang lebih rendah/datar. Pada budaya ini tentu saja ada anggapan bahwa puncak-puncak gunung adalah tempat bersemayamnya roh suci leluhur (Geldern, 1934 : 5-40). Kepercayaan akan adanya kehidupan di alam arwah sudah ada sejak masa prasejarah sampai saat ini. Ada anggapan bahwa kehidupan di alam sana ikut mempengaruhi kehidupan di alam ini. Kepercayaan ini memunculkan suatu tradisi penempatan bangunan suci di puncak gunung atau di lereng gunung untuk mendekatkan diri dengan para leluhur untuk lebih cepat menerima restu/wahyu dari nenek moyang.

Prinsip dasar dari suatu tata cara penguburan adalah dibuatnya lubang langsung di tanah ataukah dibuat semacam wadah kubur untuk meletakkan mayat. Di atas lubang kubur dibuatlah tutup untuk menghindari segala kemungkinan baik itu menyangkut fisik lingkungan mungkin juga dilatarbelakangi oleh suatu kepercayaan. “Kubur duduk” yang berhasil diamati di situs Desa Hu’u ini merupakan kubur yang sengaja liang lahatnya dibuat langsung di tanah dengan susunan batu andesit yang tersusun rapi membentuk silinder seperti sumur dengan kedalaman 1.5m/150cm. Tradisi budaya semacam ini sangat dekat dengan tradisi penguburan yang dilakukan oleh masyarakat Sumba Merapu sekarang. Masyarakat Sumba Merapu membuat bak batu monolit untuk menempatkan si mati. Sikap si mati pada posisi duduk dan beberapa bekal kubur ditaruh di sampingnya seperti “*mamuli*”, “*maraga*”, dan sebagainya (Purusa, 2003), di atas bak batu kubur/kabang dibuat dari batu datar utuh satu dengan ukuran bervariasi. Konsep-konsep “kubur duduk” semacam ini tampaknya sangat dekat dengan tradisi yang ada di Sumba Barat, namun di tempat ini masih ditentukan oleh status sosial si mati pada waktu masih hidup, sehingga muncul istilah “*kabang*” berkaki, dan sebagainya. Budaya-budaya kubur semacam ini berkembang berkisar antara 2000-2500 tahun yang lampau. Pada waktu itu diperkirakan adanya migrasi budaya dari Asia daratan ke Indonesia. Menurut perkiraan, bahwa “*kabang*” mempunyai bentuk yang sama dengan perahu, hal ini mengingatkan kita bahwa budaya ini datang

dengan mempergunakan perahu, contoh lain penggunaan sarkofagus sebagai wadah kubur di Bali (Soejono, 1977).

“Kubur duduk” yang dapat diamati di situs Hu’u Lama dapat dikelompokkan, dan telah dicoba untuk mengadakan ekskavasi sistematis untuk mendapatkan temuan-temuan serta, yang mungkin berfungsi sebagai bekal kubur, dan di samping itu untuk mengetahui bentuk utuh dari dinding wadah kubur tersebut. Pada penelitian tahap I ini, belum dilakukan ekskavasi di kelompok I, sedangkan ekskavasi hanya dilakukan pada “Kubur duduk” yang berada di sebelah timur rumah panggung tersebut berjumlah delapan buah dengan ukuran sebagai berikut :

Kubur duduk No. 1	panjang	: 180 cm
	Lebar	: 70 cm
	Tinggi	: 20 cm
Kubur duduk No. 2	panjang	: 110 cm
	Lebar	: 78 cm
	Tinggi	: 20 cm
Kubur duduk No. 3	panjang	: 130 cm
	Lebar	: 98 cm
	Tinggi	: 19 cm
Kubur duduk No. 4	panjang	: 76 cm
	Lebar	: 74 cm
	Tinggi	: 26 cm
Kubur duduk No. 5	panjang	: 121 cm
	Lebar	: 110 cm
	Tinggi	: 30 cm
Kubur duduk No. 6	panjang	: 146 cm
	Lebar	: 86 cm
	Tinggi	: 19 cm
Kubur duduk No. 7	panjang	: 108 cm
	Lebar	: 104 cm
	Tinggi	: 20 cm
Kubur duduk No. 8	panjang	: 135 cm

Lebar : 85 cm
Tinggi : 35 cm.

Dari semua “Kubur duduk” yang kami catat salah satu di antaranya kami gali (ekskavasi) secara sistematis dengan waktu yang sangat singkat. “Kubur duduk” yang kami gali adalah “kubur duduk” No. 8 dengan berbagai pertimbangan yang ada. Hasil ekskavasi/penggalian ini berhasil dikumpulkan antara lain beberapa gerabah (pecahan periuk) yang terdiri atas tepian dan badan polos (spit 3). Pada kedalaman 65-95 cm tampak susunan batu andesit yang merupakan bagian dalam dari sumuran (kubur duduk), dan temuan dapat dikumpulkan antara lain keramik fragmen gigi manusia satu buah, fragmen tulang. Ekskavasi ini diakhiri sampai kedalaman 1,5 meter, mengingat waktu yang sangat singkat dan perlu dilanjutkan sampai pada bagian dasar liang lahat (kubur).

Dari seluruh kegiatan yang dilakukan pada tingkat awal di situs “Kubur duduk”, berhasil dikumpulkan temuan antara lain : data dari usaha percobaan penggalian sistematis terhadap “kubur duduk” sebanyak tiga buah dari keseluruhan jumlah 8 (delapan) buah (Purusa, 2003).

- | | |
|-------------------|---|
| Kubur duduk I : | - Manik-manik 3 (tiga) buah manik-manik |
| | - Kereweng/gerabah hias 15 buah |
| | - Fragmen gigi manusia 14 buah |
| Kubur duduk II : | - temuan manik-manik 4 (empat) buah |
| | - Kereweng/gerabah 14 buah |
| Kubur duduk III : | - temuan kereweng 7 (tujuh) buah |
| | - Batu kwarsa 1 kantong plastik kecil. |

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di situs tersebut, belum mencapai hasil maksimal, karena ekskavasi di “Kubur duduk” No. 8 belum nampak secara keseluruhan atau belum dapat diketahui bentuk asli keseluruhan wadah “kubur duduk” tersebut. Dalam penelitian ini, belum menemukan sistem (pola) penguburan di situs “kubur duduk”. Meskipun demikian, bahwa artefak-artefak yang ditemukan di situs itu dapat

dikategorikan sebagai tempat penguburan, dan oleh masyarakat setempat disebut “Kubur duduk”. Hal ini masih perlu dibuktikan tinggalan-tinggalan budaya dan tradisi yang berlangsung di tempat itu, sudah tentu dibarengi dengan pengamatan daerah-daerah di sekitar situs itu.

Selain itu, di puncak “Doro Manto” ditemukan sistem kubur yang memanfaatkan batu gunung sebagai liang lahat, apakah hal ini mempunyai kaitan bahwa ada dua budaya yang berbeda pada sebuah situs, tentu hal ini sangat perlu pengamatan yang lebih cermat dan mendalam. Secara sepintas muncul dua hal yang berbeda yaitu di satu sisi mereka membuat wadah kubur (kubur duduk) sedangkan di puncak Doro Manto, mereka memanfaatkan batu gunung langsung sebagai liang lahat kubur, bukankah yang lebih sederhana dikatakan mempunyai umur yang lebih tua, karena pola berpikir mereka masih terbatas, dan mengenai situs “Kopanchoi” akan kami bicarakan secara khusus di lain kesempatan tulisan.

Suatu budaya seperti “kubur duduk” yang ditemukan dan berada di Desa Hu’u Lama ini sudah menjadi tinggalan arkeologis yang tidak berkesinambungan pada tradisi masyarakat yang ada sekarang. Mereka mengenal bahwa tinggalan ini merupakan tinggalan nenek moyang yang sangat dikeramatkan. Suatu budaya tentu ada masyarakat pendukungnya, dalam hal ini muncul pertanyaan yaitu di mana dan ke mana pendukung kebudayaan ini? Pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab, namun sangat perlu untuk diketahui dan dicari bekas-bekasnya. Mungkin budaya ini dapat dibandingkan dengan suatu tradisi budaya masyarakat Sumba Merapu di Sumba yang bertempat tinggal di berdekatan dengan tempat-tempat kubur tersebut dan pola penempatan pemukiman ini mempunyai aturan seperti yang terjadi di Bali. Hal ini sangat penting untuk diamati dan dikaji lebih mendalam guna mengetahui lebih jauh mengenai perkembangan suatu budaya.

Dalam kesempatan lain, penelitian yang lebih sistematis perlu dilakukan, mengingat masih banyak hal-hal yang perlu mendapat perhatian secara khusus. Penanganan ini memerlukan kemauan, ketekunan dan ketelitian, di samping itu perhatian serta bantuan dari pihak-pihak yang berkompeten.

III. Kesimpulan

Situs “kubur duduk” yang ditinjau secara sepintas oleh para arkeolog menghasilkan hal-hal yang sangat penting dari sisi perkembangan kebudayaan masa lampau. Situs “kubur duduk” merupakan istilah yang dipinjam dari masyarakat Desa Hu’u Lama sekarang, dan hal ini perlu dibuktikan keberadaannya. Maka dari itu muncul pertanyaan apakah penamaan kubur ini didasari oleh temuan masyarakat yang menggali tempat ini, untuk mencari harta karun menemukan kerangka manusia dalam posisi duduk, ataukah mungkin asosiasi masyarakat bahwa manusia yang dimasukkan ke dalam kubur yang diameternya relatif kecil dimanfaatkan dengan posisi duduk, suatu kejadian budaya yang masih perlu dibuktikan. Bahan batu kubur disusun secara rapi berbentuk silinder (sumur kecil) untuk tempat mayat. Kalau dilihat dari cara membuatnya menunjukkan suatu tingkah laku budaya yang cukup tinggi. Pembuatan “kubur duduk” dengan materi bangunan dibuat dari batu andesit yang disusun sangat beraturan tentu dikerjakan oleh golongan masyarakat yang mempunyai suatu keahlian yang khusus pada waktu itu. Pada masa itu berkembang di dalam masyarakat kelompok-kelompok masyarakat seperti para undagi yaitu ada undagi kayu (membuat rumah), undagi batu mungkin yang menghasilkan peti batu sarkofagus atau di situs ini dikenal dengan “kubur duduk,” dan masih banyak lagi undagi-undagi yang ada pada waktu itu (Goris, 1954). Di Indonesia kubur seperti ini satu-satunya ditemukan di Desa Hu’u Lama (Dompu) apakah hal ini tersebar ke seluruh kepulauan Indonesia tentu masih perlu dicari. Menurut informasi pakar arkeologi yaitu Dr. Haris Sukendar, bahwa kubur seperti ini terdapat juga di Jepang dan Korea. Apakah hal ini mempunyai pengaruh sampai Kepulauan Nusantara, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan sistematis.

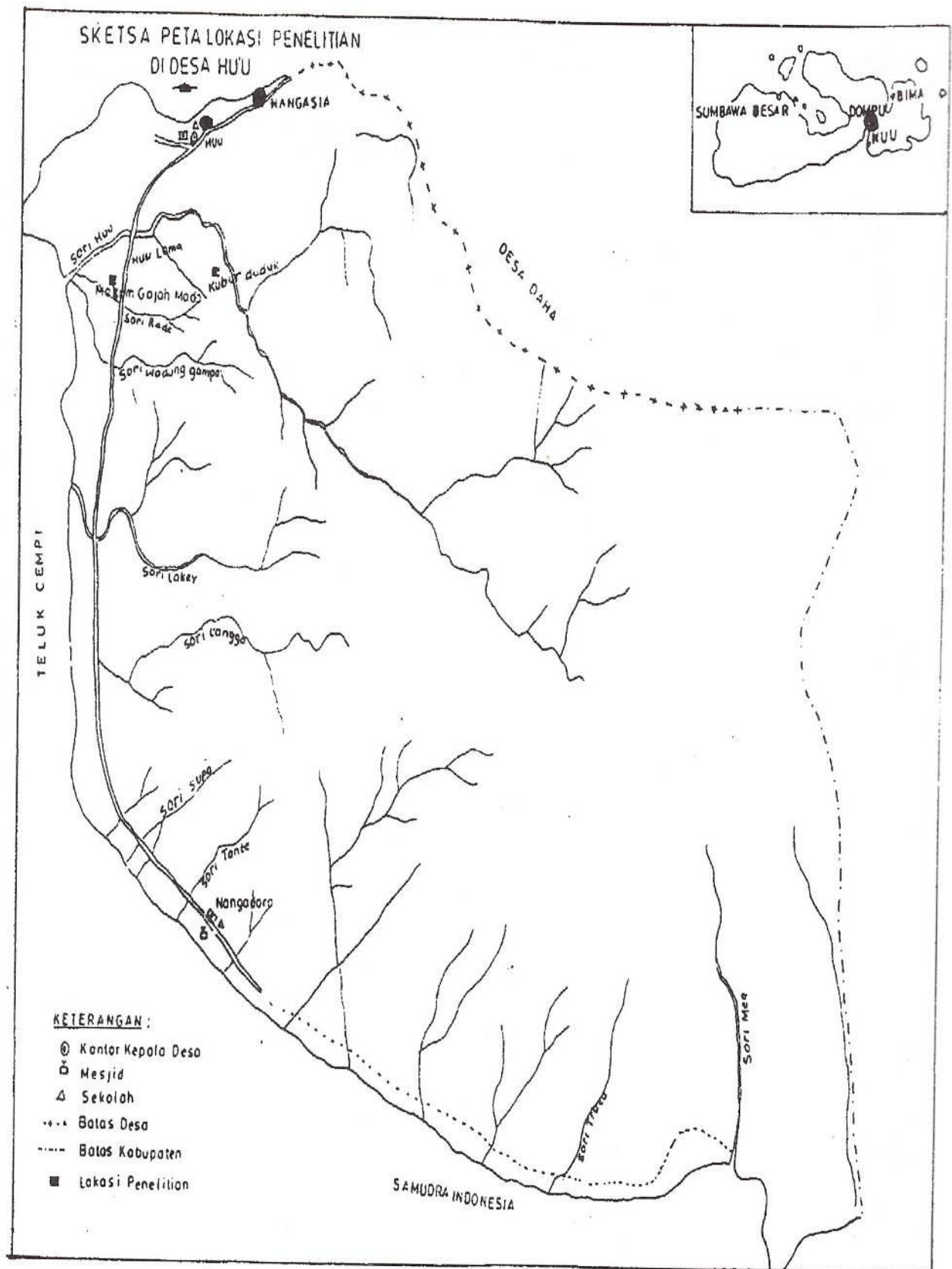
Masih banyak lagi hal-hal atau data-data arkeologis yang lain harus diamati terutama yang menyangkut perkembangan (dinamika) budaya ini. Aspek lain yang sangat perlu diketahui adalah tempat bermukim mereka

yang sudah tentu dibarengi dengan data-data (artefaktual) arkeologis. Dari segi bentuk dan pemanfaatan kubur sangat perlu dilakukan studi yang lebih mendalam untuk mencari ukuran dari masing-masing kubur yang nantinya akan menjadi dasar dalam pengelompokkan kubur tersebut. Dari pengelompokkan itu akan mendapatkan penggunaan atau fungsi yang sama. Masih banyak data yang diharapkan untuk suatu pengungkapan satu peristiwa budaya. Besar harapan kami, kegiatan-kegiatan atau penelitian di bidang arkeologis khususnya untuk Kabupaten Dompu yang kaya dengan tinggalan arkeologis dapat diteruskan dengan menjalin kerja sama demi peningkatan serta kecintaan akan warisan budaya masa lampau. Di samping itu masih banyak situs-situs arkeologis yang perlu ditinjau dengan tujuan Pemda Dompu untuk merintis pariwisata budaya. Semoga harapan ini dapat terwujud dalam waktu yang tidak begitu lama.

Tulisan pada kesempatan ini tak lain adalah hanya merupakan pemuka jalan ke arah yang lebih luas. Misteri “Kubur duduk” diharapkan akan segera terungkap sejalan dengan data arkeologis yang menunjangnya. Pengamatan yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya melatarbelakangi budaya ini, sehingga meninggalkan artefak budaya seperti yang kita lihat sekarang ini. Suatu peristiwa budaya yang masih menyimpan misteri yang harus dicari.

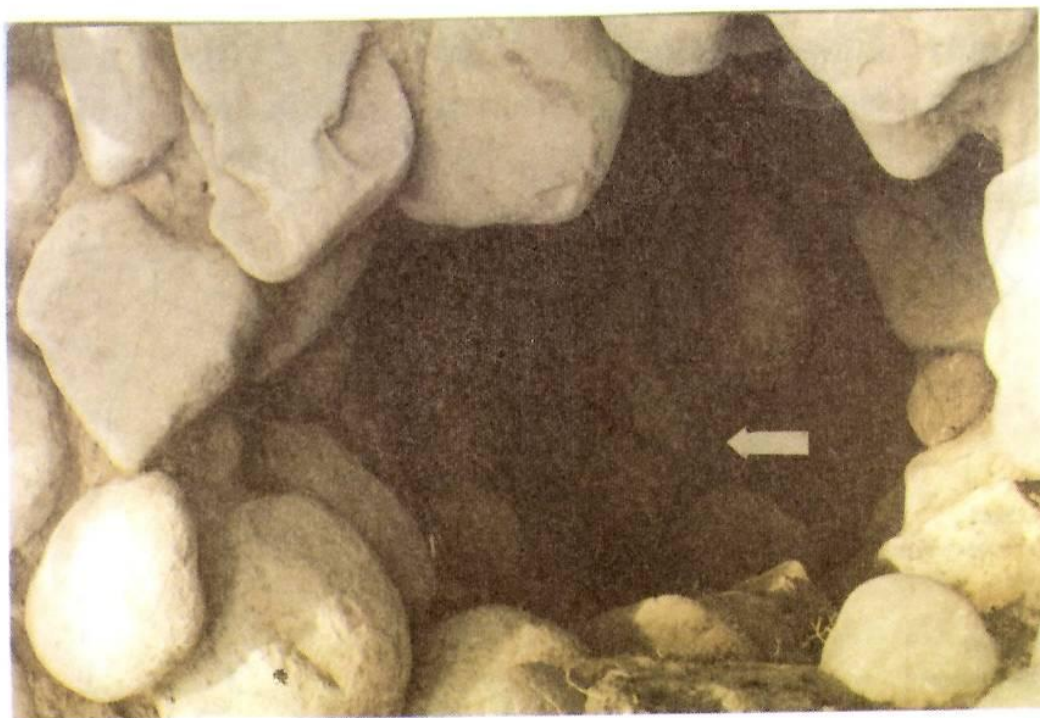
DAFTAR PUSTAKA

- Goris, R. 1954. *Prasasti Bali I dan II*, Bandung, Masa Baru.
- Heine Geldern, R.von, 1934: *Vorgechtkuche Grudlagen der Kolomalindischen Kunt*, Weiner Beitragezur Kunsten Kulturgeschictwe Aseins VIII.
- Koentjaraningrat, 1958. *Metoda-metoda Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, Jakarta.
- , 1977. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Purusa M, 2000. “Budaya Pemujaan Leluhur Cermin Kesatuan dan Persatuan”, *Seminar Prasejarah II & Kongres API II*, Yogyakarta.
- , 2003. *Laporan Hasil Penelitian di situs Nangasia*, Maret dan Juli, Balai Arkeologi Denpasar.
- , 2003. “Upacara Ritual Masyarakat Sumba Merapu,” *Berita Penelitian Arkeologi*, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ISSN 1410-6477, Balai Arkeologi Denpasar.
- Soejono, R.P., 1977. *Sistem-sistem Penguburan pada Akhir Masa Prasejarah di Bali*, Disertasi, Universitas Indonesia, Jakarta.





Tutup kubur dari batu monolit di situs Kubur duduk.



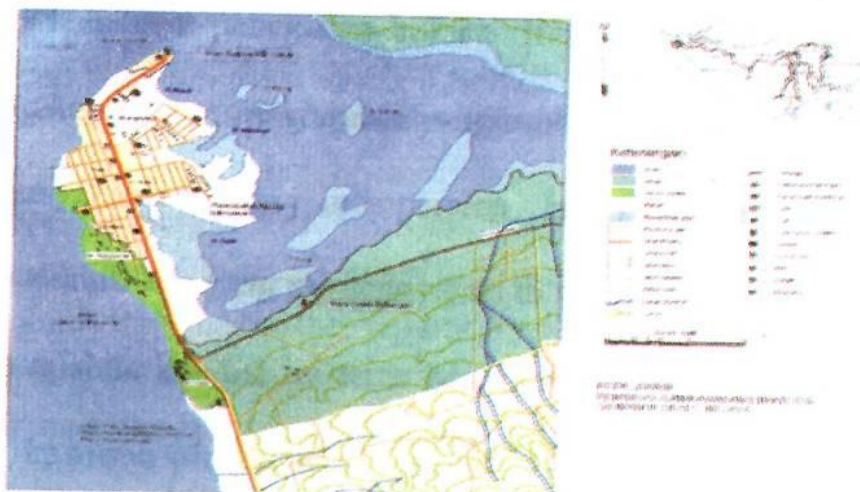
Kubur duduk dari susunan batu andesit.

Dampak Lingkungan terhadap Situs Gilimanuk dan Kerja Sama Terpadu dalam Pengelolaan

I Made Geria

I

Gilimanuk sebagai pintu gerbang Bali Barat merupakan kawasan strategis dalam pengembangan ke depan. Sebagian wilayah ini merupakan zonasi Taman Nasional Bali Barat yang diibaratkan merupakan paru-paru Pulau Bali. Di lokasi ini juga terdapat Situs Gilimanuk sehingga kawasan ini merupakan zona multi dimensi, di satu sisi merupakan kawasan cagar alam di sisi lain merupakan situs Arkeologi. Situs Gilimanuk yang sangat berpotensi mengungkap khasanah budaya lampau khususnya bukti-bukti kehidupan masa perundagian di Bali mulai terancam eksistensinya. Salah satu penyebabnya kurang ditaati peraturan pemerintah tentang penataan tata ruang kawasan, sehingga terjadilah pemanfaatan tanah negara tanpa mempertimbangkan pemintakan (zoning) situs. (lihat gambar 1).



Gambar. 1 Peta Lokasi situs Gilimanuk



Keadaan yang demikian ini semakin memicu kedatangan para urban mengais rezeki di kawasan ini, apalagi Gilimanuk merupakan kawasan pelabuhan. Akibatnya belum sempat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) tersusun Gilimanuk sudah penuh sesak. Kawasan yang di tahun 1980 masih terhampar perkebunan sekarang disulap menjadi tiga dusun baru dengan ribuan penduduk. Kenyataan ini tidak seimbang dengan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) seiring pula dengan kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar yang memanfaatkan sumberdaya alam sehingga berdampak terhadap kerusakan lingkungan. Keberadaan Situs Gilimanuk semakin termarginalkan serta kelestarian pantai dan mangrove terancam karena sejumlah pemukiman kumuh semakin berkembang. Padahal kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 736/Mentan/X/1982 sebagai areal zona Taman Nasional Bali Barat (PPTNBB, 1977). Namun oleh pemerintah daerah Jembrana sebagian kawasan tanah negara ini seluas 1.449.670 m² dimohon peruntukannya sehingga ke luar sertifikat HPL (Hak Pengelolaan) pada tahun 1992. Indikasi ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum. Ironinya tanah negara ini disewakan kepada masyarakat dengan persyaratan yang mudah. Rendahnya biaya kontrak dan mudahnya persyaratan untuk memperoleh lahan tersebut semakin memicu kedatangan penduduk luar yang mengais rezeki di wilayah ini.

Diduga apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa ada upaya penyelesaian komprehensif kawasan lingkungan pesisir semakin rusak dan mengancam keselamatan situs. Padahal keberadaan situs ini merupakan aset budaya yang memberikan kontribusi terhadap sumber pendapatan daerah karena kawasan situs ini dapat dijadikan daerah destinasi wisata, sehingga harus dilindungi keberadaannya (lihat lamp. 1 potensi situs). Oleh karenanya penanganan pelestarian lingkungan tidak cukup hanya dengan pemahaman faktor biologis diperlukan pemberdayaan sumber daya manusia yang peka terhadap lingkungan. Dalam kaitan dengan pengelolaan lingkungan diperlukan di masing-masing wilayah memberdayakan masyarakat dengan memperhatikan swasembada dan keadilan sosial.

Konversi lahan harus dihentikan serta memberdayakan masyarakat melestarikan lingkungan karena lingkungan tersebut sumber kehidupan masyarakat. Salah satu usaha dilakukan dengan kerja sama terpadu instansi terkait dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat. Isu-isu yang mencuat tentang kerusakan lingkungan di kawasan pesisir Situs Gilimanuk akibat dari lemahnya peran serta masyarakat. Faktor lainnya berpengaruh akibat heterogenitas penduduk pendatang yang tidak mengakar dan membawa persepsi dan kepentingan beragam. Pengelolaan sumberdaya alam maupun budaya yang berlangsung dan dilaksanakan berbagai instansi masih berjalan sendiri-sendiri, untuk ke depannya pengelolaan pesisir Gilimanuk perlu dilaksanakan secara terpadu yang diarahkan pada upaya-upaya pelestarian dan perlindungan keragaman hayati maupun warisan budaya.

Pesatnya perkembangan kawasan pantai dengan berbagai pemanfaatan multiguna, telah menimbulkan berbagai masalah lingkungan. Masalah lingkungan utama dalam pengembangan sumberdaya pantai disebabkan oleh aktivitas manusia yang bersifat destruktif, eksploitasi berlebihan, kurang harmonis dalam pemanfaatan ruang kawasan serta masalah yang berkaitan dengan aktivitas pembangunan. Berkenaan dengan fenomena tersebut, muncul permasalahan antara lain (1) Mengapa kawasan Situs Gilimanuk dijadikan lahan peruntukan permukiman, padahal merupakan kawasan konservasi. (2) Bagaimanakah pengaruh perkembangan permukiman terhadap Situs Gilimanuk? (3) Bagaimanakah bentuk kerja sama terpadu sebagai upaya dalam pengelolaan situs? Ruang lingkup yang dibahas menyangkut perlakuan masyarakat terhadap lingkungan pesisir dan upaya terpadu dalam pengelolaan Situs Gilimanuk. Tujuan dan Manfaat: 1) Untuk mengetahui dampak lingkungan terhadap Situs Gilimanuk. 2) Menggali dan menginventarisasi nilai-nilai potensi sumberdaya budaya dan lingkungan yang terkandung pada Situs Gilimanuk. 3) Mengkaji kembali model pengelolaan yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk kepentingan studi budaya maupun aspek lingkungan. Sebagai kajian awal dalam pengembangan zona ini sebagai

kawasan ekowisata terpadu.

II

Kemitraan merupakan salah satu model pengelolaan terpadu, merupakan kerja sama yang saling disepakati antara dua atau lebih publik, organisasi swasta atau lembaga swadaya pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan bersama, untuk keuntungan lingkungan dan masyarakat (Bruce Mitchell, 2000:256). Jadi aspek yang fundamental disini yakni ; alasan menyertakan masyarakat atau kelompok, bentuk kemitraan yang dipilih, tingkat pelibatan masyarakat dan strategi pemberdayaan masyarakat. Masyarakat yang mempunyai peran utama sebagai pengelola para praktisi pembangunan berposisi sebagai pihak yang memfasilitasi upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sumber-sumber lokal (Harry Hikmat, 2001 : 243). Terkait dengan keberadaan situs pada kawasan lingkungan pesisir perlu dipahami strategi pengelolaan wilayah pesisir. Pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (*coastline*), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (*boundaries*), yaitu batas sejajar garis pantai (*longshore*) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (*cross-shore*). Penetapan batas-batas wilayah pesisir yang sejajar dengan garis pantai relatif mudah, sehingga pembatasan ini yang dipergunakan. Proses pengelolaan ini dilaksanakan secara kontinu dan dinamis dengan mempertimbangkan segenap aspek sosial ekonomi budaya dan aspirasi masyarakat, serta konflik kepentingan pemanfaatan kawasan pesisir (Rokhmin Dahuri, 2001 : 6).

Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu adalah suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumber daya dan kegiatan pemanfaatan secara terpadu (*integrated*). Dalam konteks ini keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi; sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis. Keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat tertentu dari tingkat desa,

kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat (*vertikal intergrasion*). Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin ilmu (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem sosial yang terjalin secara kompleks dan dinamis. Seperti diuraikan di atas, bahwa wilayah pesisir Gilimanuk pada dasarnya tersusun dari berbagai macam ekosistem (mangroves, estuaria, pantai berpasir dan lainnya) yang satu sama lain saling terkait. Perubahan atau kerusakan yang menimpa satu ekosistem akan menimpa pula ekosistem lainnya. Suatu contoh kerusakan kawasan mangrove berdampak terhadap keberadaan Situs Gilimanuk. Selain itu, wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh berbagai macam kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah.

Pengelolaan sektor pembangunan wilayah pesisir Indonesia dan Bali khususnya dimanfaatkan secara beranekaragam. Namun perlu diperhatikan agar kegiatan yang beranekaragam ini dapat berlangsung secara serasi. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir sering kali berbeda antara sektor yang satu dengan yang lain, tergantung pada kebutuhan dan kewenangan dari masing-masing sektor tersebut. Pemanfaatan yang beranekaragam antar sektor ini dapat menjadi sumber pemicu terjadinya konflik, pada akhirnya akan mengganggu keseimbangan ekosistem wilayah pesisir itu sendiri. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu lingkungan dan berlanjut dengan terjadinya perubahan ekosistem pesisir dan lautan itu (Otto Soemarwoto, 2001).

Masalah utama yang sering menjadi kendala dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan, adalah (1) pemanfaatan ganda dari berbagai sumber daya alam tanpa adanya koordinasi keterpaduannya, (2) pemanfaatan sumber daya alam yang tidak rasional (3) pengaruh kegiatan manusia, (4) pencemaran perairan wilayah pesisir, dan (5) kerusakan fisik habitat dan eksploitasi lebih (*over exploitation*) sumber daya pesisir. Semua klausul tersebut berperan dalam kerusakan Situs Gilimanuk.

Dasar pertimbangan dalam pengembangan pemukiman di kawasan pesisir adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. KEP-45/MENLH/11/1996 tentang Program Pantai Lestari. Salah satu pasal menyebutkan penanggung jawab kegiatan di pesisir hendaknya melakukan pencegahan terhadap kerusakan wilayah lingkungan pantai, dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan wilayah pantai, serta adanya koordinasi yang baik antar lembaga dalam pengelolaan. Rencana pembangunan di sekitar situs harus memperhatikan kelestarian situs bersangkutan karena pemanfaatannya dilindungi oleh UUD No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Koesnadi Hardjasoemantri, 2001 : 215). Yang penting juga pendekatan Ekologi Budaya atau diistilahkan *cultural ecology* (Hari Poerwanto, 2000 : 68) yang dikembangkan dalam pendekatan ekologi kebudayaan adalah paradigma ekosistem, yaitu yang menempatkan manusia, beserta kebudayaan sebagai salah satu unsur dalam jaringan interaksi energi, bahan dan informasi. Kebudayaan yang dimaksud adalah suatu lembaga sosial yang tercipta dan diciptakan oleh manusia, untuk mengelola rangkaian proses interaksi tersebut (Johan Iskandar, 2001). Salah satu aspek kebudayaan yang paling erat terkait dengan pengaruh lingkungan ialah *aspek prilaku*, terutama yang berhubungan dengan produksi, konsumsi dan distribusi. Ketiga hal tersebut secara fungsional mempengaruhi keberlangsungan eksistensi suatu sistem sosial budaya dalam suatu lingkungan ekologis tertentu. Dalam hal ini adaptasi lebih dipahami sebagai suatu rangkaian proses timbal balik antara manusia dan lingkungan yang tercermin dalam pola prilaku dalam sistem mata pencaharian hidup.

Dari berbagai pendekatan di atas diketahui, keberadaan Situs Gilimanuk yang berada pada wilayah pesisir merupakan kawasan yang dikelola berbagai pihak dan banyak kepentingan. Diketahui dari data yang diperoleh dari Pemda Jembrana pemanfaatan lahan di kawasan ini dimulai tahun 1974 pada wilayah Dusun Penginuman. Sedangkan pemanfaatan permukiman di sekitar situs dimulai tahun 1987, yang sekarang sudah berkembang menjadi dua dusun baru antara lain Dusun Arum dan Dusun Asri. Status

tanah di sekitar Situs Gilimanuk merupakan milik negara, pengelolaannya ditangani oleh Pemda TK II Jembrana berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) tahun 1992. Masyarakat yang menggunakan tanah di sekitar situs untuk permukiman hanya memiliki hak guna bangunan (HGB) dengan cara menyewa kepada Pemda Jembrana. Kendati demikian tidak semuanya pemilik lahan di kawasan ini memiliki surat HGB, diantaranya Dusun Asri sebanyak 129 kavling, Jineng Agung 97 kavling, belum memiliki tanda bukti HGB. Diduga pemanfaatan lahan tersebut tanpa izin karena sering terjadi penghibahan pemanfaatan lahan dilakukan di bawah tangan. (lihat gambar 2)



Gambar 2 Pemukiman yang terkesan kumuh dikawasan pesi Gilimanuk (Dusun Arum)

Memperhatikan kondisi riil di lapangan setelah diadakan observasi di tiga lingkungan yang berakses langsung pada Situs Gilimanuk yakni Dusun Jineng Agung, Dusun Asri dan Arum perkembangan penduduknya sangat signifikan. Dekade terakhir ini jumlah penduduk Dusun Jineng Agung 1.014 orang dari 300 KK dengan luas areal 326.890 m² (212 kapling). Lingkungan Asri jumlah penduduk 1.198 orang dari 209 KK, menempati areal 146.462 m² (360 kapling) (Setda Kabupaten Jembrana, 2001). Konsekuensi dari pertumbuhan penduduk yang melebihi daya dukung berdampak terhadap kerusakan lingkungan maupun situs arkeologi, karena sebagian besar masih memanfaatkan lingkungan sekitarnya sebagai tumpangan mata pencaharian. Salah satu contoh terancamnya tanaman mangrove. Karena tanaman mangrove sangat penting berfungsi sebagai penyangga pantai dari abrasi. (lihat gambar 3).



Gambar 3 Tampak Eksploitasi terhadap Mangrove di pesisir Gilimanuk

Keberadaan mangrove pesisir Gilimanuk memberikan keuntungan bagi zona situs ini karena mangrove berfungsi untuk kemantapan lingkungan, antara lain mengurangi akibat negatif dari kekuatan alam, seperti angin, empasan gelombang arus dan banjir. Fungsi Biologi tempat benih ikan, udang, kerang-kerang pantai, tempat bersarang burung, habitat alami bagi banyak jenis biota. Maupun fungsi ekonomi yang potensial lainnya. Jadi dengan terpeliharanya mangrove Gilimanuk dengan sendirinya situs ini terpelihara dari kepunahan. Namun pada kenyataannya areal mangrove di sekitar Situs Gilimanuk menyatu dengan rumah penduduk ada kecurigaan lama kelamaan bisa menjadi lahan konversi peruntukan. Pemanfaatan lahan tersebut sebagai lahan pertanian mengancam keberadaan situs, karena dicurigai masih banyak temuan yang belum tergali (ekskavasi). Jadi bila lahan itu dimanfaatkan sebagai lahan pertanian akan merusak keberadaan situs. Oleh karenanya pemanfaatan lahan di sekitar Situs Gilimanuk untuk permukiman sebaiknya dihentikan karena dapat mengganggu kelestarian situs. Dalam hubungan ini Pemerintah Daerah Tingkat II Jember melalui Lurah Gilimanuk harus melakukan hal tersebut, karena luasan situs secara keseluruhan belum diketahui secara akurat.

III

Bila dicermati dari ketentuan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 mengenai pengelolaan kawasan lindung ada ditekankan bahwa pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah dan budaya. Apabila dalam penataan ruang melanggar ketentuan tersebut berakibat pada pertumbuhan urban development kurang terkendali. Bisa terjadi sisa kawasan situs yang hanya 5 ha dari 20 ha luas keseluruhan Situs Gilimanuk akan semakin terancam. Kondisi riil yang terjadi di kawasan ini sudah dipandang tidak kondusif untuk kelanjutan kelestarian kawasan situs. Tidak dilibatkannya instansi terkait dalam hal ini, Balai Arkeologi mengakibatkan dalam penataan kawasan situs tersebut

semakin tidak terarah, terbukti pada saat pemilihan lokasi Museum pada kawasan yang padat temuan tanpa guideline teknik yang tepat berakibat rusaknya kandungan situs arkeologi.

Pada dasarnya perlakuan ini akibat dari belum adanya koordinasi dalam pengelolaan kawasan yang selayaknya harus dikelola secara terpadu, tetapi yang terjadi hanya ego sektoral. Tidak sesuai sasaran rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan laut di Bali. Yang menekankan pengelolaannya berdasarkan prinsip pelestarian sumber daya alam dan pelestarian nilai budaya (Bappeda, 1998 : 21). Seringnya terjadi konflik kepentingan seperti contohnya kasus yang di atas tadi, tidak terlepas dari kendala yang terjadi antara lain; kurang mantapnya penerapan kebijakan dan penegakan hukum, kurangnya kepedulian masyarakat akan pentingnya kelestarian sumber budaya (Situs Gilimanuk). Terdapatnya pandangan yang lebih menitik beratkan pada keuntungan finansial jangka pendek. Tidak adanya koordinasi antar sektor sehingga perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya budaya masih tumpang tindih, dan kurang memikirkan pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap kawasan tersebut.

Dijadikannya kawasan ini sebagai permukiman berdampak terhadap tingginya tekanan penduduk terhadap daya dukung suatu kawasan, yang berpotensi menimbulkan permasalahan terhadap keselamatan situs. Aktivitas manusia ini dapat menyebabkan penurunan jumlah dan kualitas sumber daya alam, terutama jika sumber daya alam dieksploitasi dengan tingkat kecepatan yang melebihi daya pulihnya (Soeriatmadja, 2001). Perlu diketahui penurunan atau kelangkaan sumber daya alam disebabkan juga lajunya pertumbuhan penduduk.

Akar permasalahan yang menjadi faktor penyebab antara lain; rendahnya kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap keberadaan Situs Arkeologi, serta disebabkan oleh keadaan perekonomian masyarakat di sekitar kawasan tersebut masih rendah. Rendahnya kualitas SDM di kalangan penduduk sekitar Situs Gilimanuk bersumber pada rendahnya tingkat pendidikan merupakan permasalahan tersendiri dalam rangka pengembangan dan

pemanfaatan kawasan Upaya Kemitraan yang dilakukan dalam pengelolaan lingkungan pesisir Situs Gilimanuk sampai sekarang belum terlaksana secara efektif. Walaupun ada upaya ke arah itu, hanya sebatas program yang belum sepenuhnya terlaksana di lapangan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan instansi pemerintah sangatlah jarang, jikapun ada terkadang program yang tidak mewakili kepentingan masyarakat. Dalam hal ini bisa didapatkan solusi apabila antara stakeholder yang terkait duduk bersama mencari titik temu dalam pengelolaan wilayah pesisir ini tanpa merugikan semua pihak. Malahan diharapkan kerja sama kemitraan tersebut membuahkan manfaat kelestarian lingkungan situs. Minimal hal ini dapat mengurangi benturan-benturan kepentingan. Namun realisasinya tidak cukup hanya mengajak masyarakat untuk memahami mengenai pentingnya kawasan pesisir Situs Gilimanuk. Akan lebih memungkinkan apabila masyarakat dalam kemitraan ini, juga mendapatkan manfaatnya sehingga timbul suatu kesadaran rasa memiliki "*sence of belonging*". Hal ini dapat diwujudkan dengan jalan menyusun rencana pelestarian dan konservasi sumber daya alam dan budaya di kawasan pesisir Situs Gilimanuk dengan pendekatan dari bawah ke atas "*bottom up planning procces*". Melalui proses ini rencana yang dihasilkan akan ikut menjadi milik masyarakat yang tinggal di dekat kawasan. Karena mereka diikutsertakan dalam penyusunan suatu rencana, maka mereka akan merasa memiliki dan lebih dari itu mereka merasa berkewajiban untuk melaksanakan rencana yang disusun. Upaya ini merupakan suatu cara dalam membina partisipasi masyarakat di seluruh kawasan Situs Gilimanuk.

Membangun kemitraan, usulan ini nampaknya sangat ideal dalam kondisi hukum yang carut marut sekarang ini. Hal itu harus segera dilakukan karena menyangkut nasib generasi bangsa ke depan. Perlu diingat bahwa sekali situs ini rusak maka konteks dan data arkeologis yang terdapat di dalamnya tidak akan dapat diperbaharui, sehingga situs itu tidak akan sampai kepada generasi yang akan datang.

Oleh karenanya landasan hukum harus jelas dan didukung oleh peraturan daerah. Bila perlu dari pihak instansi yang membidangi Arkeologi, Uni-

versitas, LSM bersatu padu mengajukan revisi tata ruang kawasan dalam rencana pengembangan kawasan strategis Gilimanuk, karena pada perencanaan tersebut hanya mementingkan pembangunan fisik seolah-olah mengebiri keberadaan situs. Sumbang pikiran pihak terkait sangat diperlukan dalam penyusunan RDTR Gilimanuk yang sekarang belum disahkan, ini merupakan hambatan yang dirasakan saat ini. Betapa tidak saat RDTR diturunkan, perkembangan Gilimanuk makin tak terbendung. Sebelum RDTR selesai, pola pengembangan serta arah kebijakan yang diambil belum bisa ditentukan. Bagaimanapun, untuk mengembangkan sebuah kawasan mesti berdasarkan pada RDTR, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi diketahui Situs Gilimanuk keberadaannya sangat strategis mendukung Taman Nasional Bali Barat yang menurut rencana akan diusulkan menjadi Warisan Alam Dunia (WAD). Dasar pemikiran ini berpijak dari sejumlah pendekatan seperti yang diuraikan dalam kajian pustaka di antaranya ketentuan pengelolaan Pantai Lestari berdasarkan Keputusan Menteri, Keputusan Presiden tentang Pemanfaatan Kawasan Lindung dan Cagar Budaya. Pendekatan dari konsep pengelolaan terpadu yang melibatkan seluruh sektor yang terkait. Hal ini perlu disepakati dulu sebelum melangkah membangun kemitraan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan situs. Dapat dikemukakan bahwa distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat terletak pada inti bagaimana masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Dari sinilah pendekatan baru harus disertakan, yaitu partisipasi lokal dalam pengambilan keputusan (Britha Mikkelsen, 2001).

Ada hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam membangun kemitraan pengelolaan lingkungan pesisir yang adaptif. (Fuad Amsyari, 1996). Memajukan tujuan lingkungan dan merevitalisasi Situs Arkeologi serta membatasi kawasan tersebut sebagai lahan peruntukkan. Tentunya hal ini perlu ditata bersama antara masyarakat setempat, pemerintah, perguruan tinggi, swasta sehingga membuat lingkungan lebih sehat dan tidak menimbulkan masalah jika dikembangkan sebagai kawasan objek wisata ekowisata (*eco tourism*). Nantinya diharapkan merubah persepsi

penduduk terhadap manfaat lingkungan pesisir Situs Gilimanuk. Hubungan yang dekat akan terjalin antar sektor yang terlibat dalam kemitraan pengelolaan. Baik pihak pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, bekerja sama dengan masyarakat. Dengan hubungan yang baik ini masyarakat pun mampu menunjukkan kemampuan dan potensinya. Pengelolaan bersama ini pengertiannya sebagai pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya lokal (Berkes, 1991 : 12). Meskipun dalam proyek ini masyarakat merupakan aktor utama, tetapi tanpa bantuan dan keikutsertaan pemerintah daerah, kegiatan ini tak akan terlaksana. Artinya bahwa tanpa garansi pemerintah untuk keamanan lingkungan masyarakat tidak bersedia untuk menyediakan uang, waktu dan tenaga untuk lingkungan mereka. Ataupun lembaga di luar pemerintah (swasta) dapat selalu berperan, baik dalam hal uang ataupun hal lain.

Contributory partnership atau kemitraan melalui kontribusi merupakan suatu kesepakatan dimana sebuah organisasi swasta atau publik setuju memberikan sponsor atau dukungan (Harry Hikmat, 2001). Masyarakat secara langsung terlibat dalam kegiatan ini. Mereka tidak hanya terlibat dalam kegiatan tetapi juga terlibat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan program ini. Keikutsertaan ini sangat penting karena membuat masyarakat merasa mempunyai andil dalam proses penataan lingkungan situs. Sedangkan peran LSM, Perguruan Tinggi lebih sebagai penghubung berperan sebagai mediator untuk membantu terjalinnya hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini pernah diterapkan dalam proyek perbaikan permukiman Kali Code, Yogyakarta (Bruce Mitchell, 2000 : 284). Model ini diterapkan juga di Taman Nasional Bali Barat kerja sama antara TNBB dengan PT. Rimbawan Sejati yang memanfaatkan kawasan hutan sebagai kawasan wisata yang ramah lingkungan yang lebih dikenal dengan Program Pariwisata Berkelanjutan (***sustainable tourism developmen***). Jadi aktivitas yang ada di sana kegiatan wisata alam yang tidak merusak kawasan. Apakah tidak mungkin dalam pengelolaan Situs Gilimanuk meniru model TNBB melibatkan pihak swasta yang dapat mengembangkan sebagai kawasan wisata edukatif, historic dan

rekreatif, yang dikemas untuk konsumsi wisata tanpa merusak keberadaan situs.

Bentuk kemitraan yang lainnya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan pesisir Situs Gilimanuk adalah Kemitraan Kolaboratif (*collaborative partnership*), untuk mencapai tujuan yang diterima semua pihak, dengan informasi, dana dan tenaga saling dipertukarkan. Ini merupakan satu-satunya bentuk kemitraan yang memberikan beberapa kekuasaannya pada organisasi di luar pemerintah. Umumnya, pelimpahan ini tidak disertai pelimpahan tanggung jawab yang tetap secara formal dipegang oleh instansi pemerintah. Dalam penanganan pemanfaatan situs sebagai objek wisata di samping memelihara keselamatan situs juga tidak merusak lingkungan pendukungnya seperti kawasan hutan mangrove. Masyarakat diberi hak untuk mengambil manfaat dari hutan mangrove tanpa menurunkan fungsi lindung hutan tersebut misalnya memelihara kepiting mangrove dan kerang yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Selain itu masyarakat juga dapat dijadikan tenaga kerja untuk membantu kegiatan kehutanan, seperti menanam bibit, survei dan sebagainya. Cara yang demikian ini pernah diterapkan JICA (Japan International Cooperation Agency) waktu penanaman mangrove di Gilimanuk. Semestinya Lembaga Kebudayaan dan Pariwisata dapat melakukan kegiatan seperti yang dilakukan JICA antara lain mengadakan kegiatan Pekan Pelestarian Pusaka Alam dan Budaya yang diadakan di kawasan tersebut di mana misinya membangun kepedulian dan komunitas "*Cultural Heritage*". Bila perlu mengadakan *Heritage Year* di Gilimanuk dengan melibatkan Eksponen pariwisata seperti PHRI, HPI dan Pratisi pariwisata lainnya. Penekanan pengelolaan pada penataan tata ruang kawasan untuk jangka pendek serta pemanfaatan kawasan ini sebagai kawasan ekowisata terpadu untuk jangka panjang. Perlu diberdayakan muatan lokal dalam komunitas adat karena dusun ini merupakan bagian dari banjar adat Prasta Guna, kendati kegiatannya belum maksimal namun sudah diakui mampu mengemban tugas menjaga ketertiban dalam mengatur pemanfaatan sumber daya lingkungan pesisir yang dikelola bersama. Hanya saja perlu diimplementasikan penerapan

konsep Tri Hita Karana yakni tiga unsur yang merupakan sumber sebab yang memungkinkan timbulnya kebaikan. Konsep yang demikian dalam tatanan kehidupan masyarakat Bali diyakini menjaga keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan lingkungannya. Implementasinya dalam penataan ruang dalam kawasan desa adat maupun pemukiman masyarakat Bali dibagi dalam zona utama (*parahyangan*), zona madya (*pawongan*), zona nista (*palemahan*). Hal yang demikian ini belum sepenuhnya diterapkan di desa adat Prasta Guna yang membawahi Dusun Asri, Asih dan Arum. Demikian juga tidak membudayanya kepercayaan lokal dalam pelestarian hutan. Sebab bukti-bukti kepercayaan ini menunjukkan bahwa banyak sumber daya alam tetap lestari karena keberadaannya diselimuti oleh kepercayaan setempat. Sebagaimana yang tampak dalam pengelolaan hutan Sangeh dan Hutan Kedaton di Bali (Atmadja, 1992, 1993).

Kesimpulan

Menyempitnya kawasan pesisir Situs Gilimanuk akibat terdesak oleh permukiman penduduk pendatang yang destruktif memanfaatkan ruang kawasan. Hal ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum dalam pemanfaatan kawasan tersebut, serta belum maksimalnya diterapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) untuk mengembangkan kawasan Gilimanuk. Terjadinya eksploitasi hutan mangrove berdampak terhadap keamanan situs karena faktor alam yang akan merusak pantai Gilimanuk yaitu adanya abrasi air laut. Dengan adanya abrasi ini maka pantai akan terkikis dan jika hal itu dibiarkan terus, maka tidak heran suatu saat situs ini akan lenyap terbawa arus. Upaya kerja sama terpadu dan kemitraan selama ini belum berjalan baik, perlu diupayakan lebih maksimal dengan pemberdayaan masyarakat. Masalah utama yang perlu ditangani dalam kemitraan ini adalah penataan dan pengendalian kawasan serta meningkatkan budidaya tanpa merusak lingkungan. Bentuk kemitraan yang diterapkan adalah kemitraan kolaboratif (*collaborative partnership*) yang merupakan kerja sama semua

pihak menyangkut semua aspek termasuk pendanaan. Alternatif lainnya lagi melalui kemitraan kontribusi (Contributory Partnership) yang melibatkan pihak swasta dalam pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amsyari, Fuad, 1996. *Membangun Lingkungan Sehat, Menyambut 50 Tahun Indonesia Merdeka*, Airlangga University Press, Surabaya
1993. *Dasar-dasar dan Metoda Perencanaan Lingkungan Dalam Pembangunan Nasional*, Widya Medika, Jakarta.
- Atmadja, Nengah Bawa, 1993. *Pemanfaatan Hutan Kedaton Sebagai Objek Wisata di Bali*, Singaraja : FKIP, Universitas Udayana.
- Bappeda Bali, 2000. *Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Gilimanuk Kabupaten Jembrana*, Bali Urban Infrastructure Project, IBRD Loan 4155 - IND
1988. *Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut*, Pemerintah Daerah Propinsi Dati I Bali.
- Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Dahuri, Rokhmin, 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan lautan secara terpadu*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fandeli, Chafid, 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemapannya dalam Pembangunan*, Liberty, Jogjakarta.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2000. *Konsistensi Penegakan Hukum dan Peranan Institusi Luar Pengadilan dalam Penyelesaian Konflik Lingkungan*. Seminar Nasional PPLH UI, Jakarta.
- Hikmat, Harry, 2001. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Humaniora Utama Press Bandung.
- Iskandar, Johan, 2001. *Manusia Budaya dan Lingkungan*, Kajian Ekologi Manusia, Humaniora Utama Press Bandung.
- Mikkelson, Brithaa, 2001. *Metoda Penelitian Partisipatoris dan Upaya*

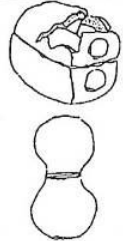
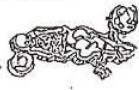
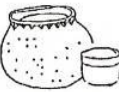
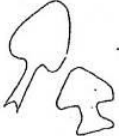
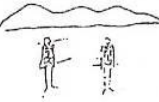
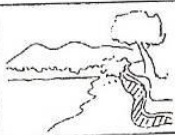
- Upaya Pemberdayaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mitchell Bruce, 2000. *Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan*, Gajah Mada University Press.
- Purwanto, Hari, 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Pustaka Belajar, Jakarta.
- Ramela, Wiwin Djuwita, 1986. *Interaksi Manusia dan Lingkungan di Gilimanuk*, Suatu Rekonstruksi, Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, hal. 489 - 509 Jakarta.
- Proyek Pengembangan TNBB, 1977. *Rencana Karya Dua Puluh Lima Tahun TNBB*, Departemen Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Taman Nasional Bali Barat.
- Soejono R.P. 1977. "*Sarkofagus Bali dan Nekropolis Gilimanuk*", Penerbitan bergambar No. 1, Proyek Pelita Pengembangan Kebudayaan, Dep. P dan K, Jakarta.
- Soemarwoto, Otto, 2001. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Soeriatmadja, R.E, 2000. *Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Tim Balai Arkeologi Denpasar, 1985. *Laporan Penelitian Arkeologi di Gilimanuk, Propinsi Bali*, Balai Arkeologi Denpasar.

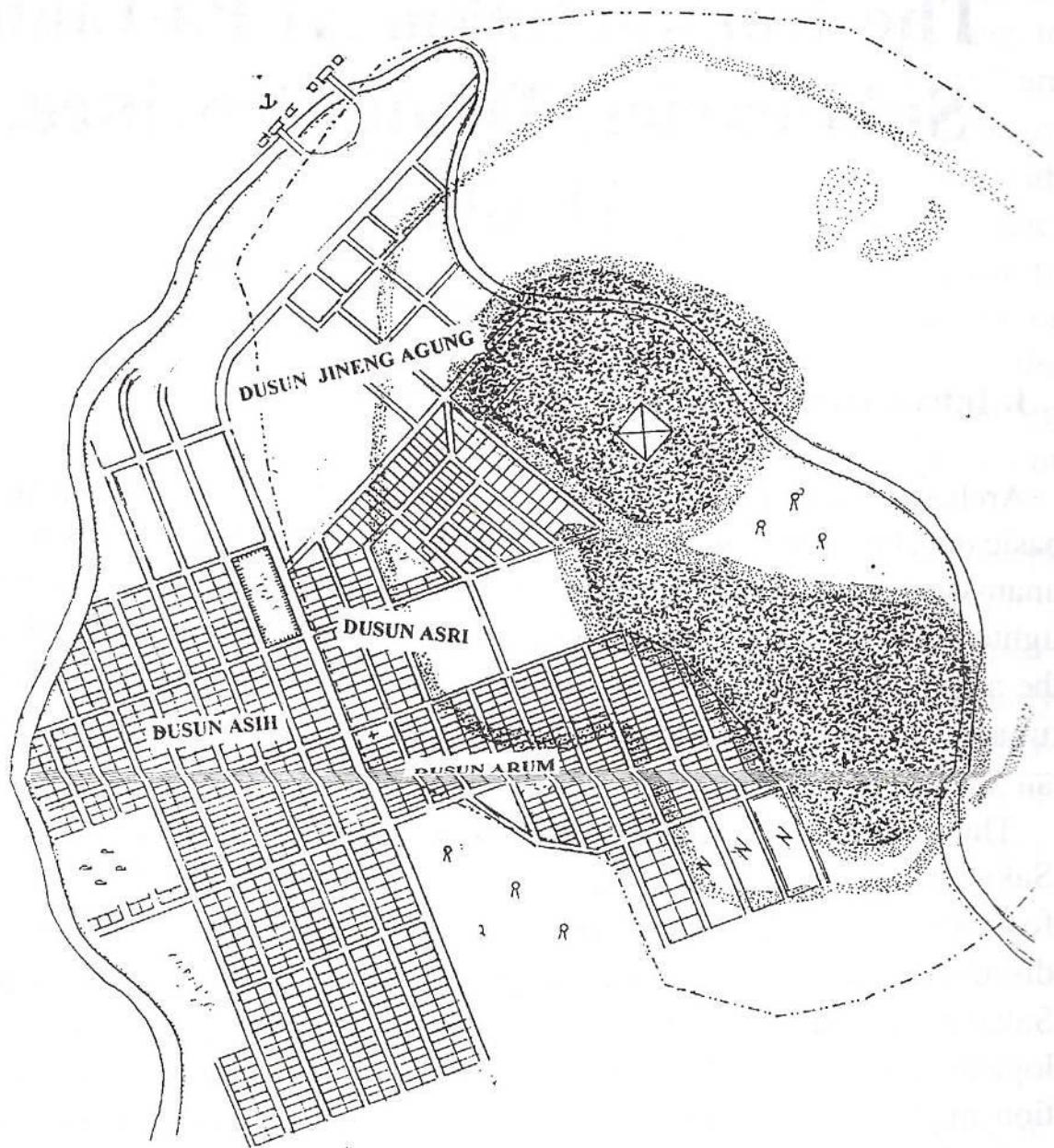


Potensi Situs Gilimanuk

Statement Significant The Archaeological Sites Of Gilimanuk

Lampiran 1

No.	Statement	Keterangan	Gambar
1.	Sistem penguburan	Wadah • Gambar/Sketsa/Peta 01 : Sarkophagus • Gambar/Sketsa/Peta 04 : Tempayan	
		Gambar/Sketsa/Peta 05 : Taman wisata	
2	Objek kultur	Gambar/Sketsa/Peta 06 : Pernak	
		Gambar/Sketsa/Peta 07 : Henda perunggu	
		Gambar/Sketsa/Peta 08 : Manik-manik	
		Gambar/Sketsa/Peta 09 : Gelang kerang	
3.	Posisi kerangka	Gambar/Sketsa/Peta 10 : Menghadap gunung Prapat Agung	
4	Lingkungan hidup	Gambar/Sketsa/Peta 11 : Pegunungan, teluk, sungai	
	Jumlah rumah dan sisa kultur	Gambar/Sketsa/Peta 12 : Masyarakat dengan muk kerat	
		Gambar/Sketsa/Peta 13 : Masyarakat dengan muk kerat	



KETERANGAN

	Zona Inti		Gardu PLN
	Batas Zona Penyangga		Pelabuhan
	Batas Zona Penunjang		Museum
	Pantai		Gates

Ethnoarchaeological Study On The Upland Sakai At Pa-Lian Subdistrict, Trang Province, Thailand

I Made Suastika

I. Introduction

Archaeology is relatively a new field of study in Southeast Asia. Some basic questions on chronological patterns and cultural sequences remained unanswered. Southeast Asian archaeology, therefore may hope to find enlightenment through investigation of contemporary ethnic groups living in the area where archaeological excavations have been conducted. It is fortunate that many Southeast Asian ethnic or tribal groups retained assemblance of their old lifeways. They remained to be the living link to an ancient past.

The focus of the field research is on the systematic excavation at the Sakai cave, and is aimed at linking or comparing archaeological find and features, specifically lithic material as may be perceived in activity areas discovered, with the living tribal groups of Sakai. It is assumed that the Sakai remained to be basically a hunter-gatherer groups, and that chronological sequences of the soil and specimens found resulting from excavation may be connected with the living Sakai's remnant hunter-gatherer technology.

The purpose of ethnoarchaeology is to systematized integrated archaeological finds with ethnographic information. Ethnoarchaeology is the study, from an archaeological perspective of material culture based on verbal about

artefacts obtained from persons, or their direct descendants, who were involved with the production (Peterson, 153 : 1974). The ideas stated and implied in this definition serve as an economical means for introducing the topic further. It might be tempting to limit the scope of ethnoarchaeology to the material forms of nonliterate peoples, if only because "primitive" are the forte of antropologist (Aswalt, 3 : 1973). However, given the goals of integrating tangible forms derived from archaeological discoveries with oral reports about them, it does not seem reasonable to arbitrarily restrict the time-space context in which these data are considered. There appear to be no compelling reasons for the excavation of houses, garbage dumps, or even garbage cans, from industrial societies being any less amenable to the ethnoarchaeological approach than that of an aboriginal shelter or kitchen midden. The analysis of it might provide worthwhile information about similar but exotic deposits (Watson, 92 : 1979).

The ethnoarchaeological study of upland Sakai group of topical concept investigation covered settlement pattern, various subsistence activities, social organization, and kinship system. Data had been collected by open-ended questions, as in interviews, life history and observing their daily routine in the camps. The mapping of Sakai settlements and graphic illustration of their materials culture were made as much as possible according to the time permitted. Analysis of ethnological data through description and comparison of present day Sakai material culture to the Sakai layer excavation may be possible at this point of the study.

II. The Hunting-gathering Groups of Sakai

2.1 Lokation

The ethnoarchaeological site is in mountainous area where the ethnic groups, Semang or Sakai inhabited. The studied area is approximately laid on the latitude 7° 13' 20" N. and longitude 99° 52' 0" E. located near Khuan Mai Dam village, pa-lian district, Trang province in the lower Southern Thailand (Fig. 1). Topographically the site is situated on the Nakhon Si

Thammarat range, which its northern original mass is underwater in the Gulf of Siam and stretch esexactly southward towards the southwesternmost of Satun province where it comes to an end along the Malaysian border (Donner, 1982).

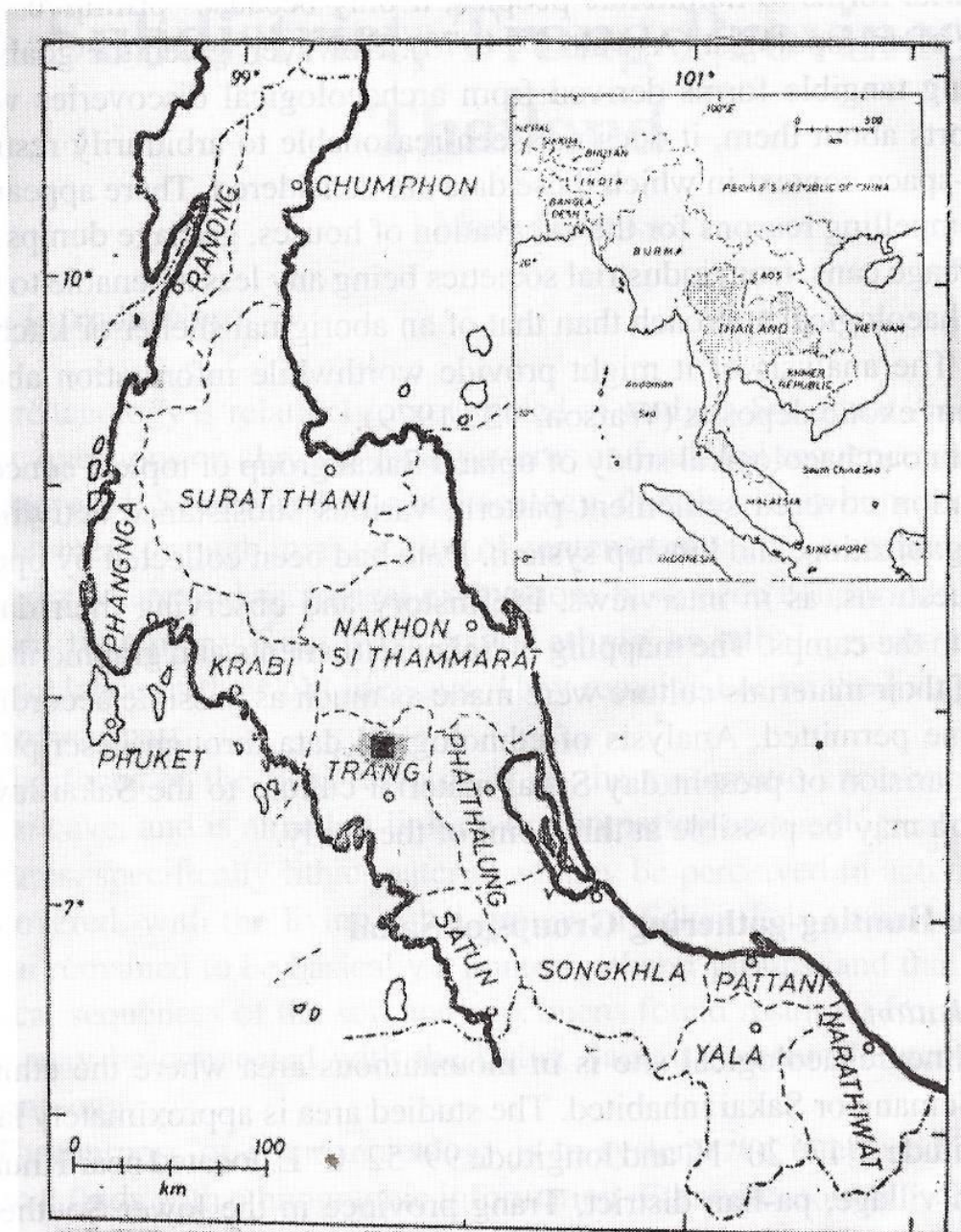


Fig1. ■ Location map of the Sakai tribes

The easiest access is by using land transportation on the route No. 404 and No. 4125 from Trang province passing through Yan Ta Khao District, pa-lian subdistrict and the last village at Ban Chao Bha before entering Khao Banthat Reservation park. The camp is settled in a small valley surrounding by numerous limestone mountains in the areas of Ban Klong Tong where a small stream, Klong Tong, emerge and flows north westward 2 Kms. Away to the lowland joining with other stream near Bon cock woor where is the landmark for further 2 hours trekking.

Among the minority groups in southern Thailand, the hill tribes Sakai is the smallest in terms of population. The Sakai band usually is composed of about 15 to 20 persons. They can be found, living in dispensed manner in the jungle of Trang. A Sakai band usually composed of an extended family of three generation. Because of their hunting and gathering existence, they live in a very simple way. Moreover, they are clever, are able to learn anything fast, especially the ways of life such as how to hunt far and gather, and how to communicate with other people.

Their settlements are located in the valley near the stream that is the source of palian river wich is called "Klong Tong" group. The villagers called the stream "Klong Tong" because many bamboo plants along the stream in the past and foremost variety of the bamboo is called "Pkai Tong" or "Tong".

2.2 The Settlement

Site study on the living of the Sakai has bound that they has two types of settlement namely the permanent and temporary camp. The permanent camp mosf of the time even during summer and rainy season when heave blood-ing accurs. However, if the climate is very hot, they transfer to the temporary camp in the forest. The Sakai build only very simple permanent shelters because their constant migration to other site which after more abundant food sources. Their shelter are usully constructed of bamboo and plants that easily found in the area (pl. 1).



Pl. 1. The permanent camp of Sakai

The Sakai shelters is the same with the shelters of Mlabri people in northern Thailand (Pookayorn, 20 :1983). The size of the shelter is small, just enough serve 2-5 family members, or people. In addition, their camp is always adjasent to a water source. The Sakai avoid dwelling in limestone caves although these are abundant and are quite suitable as shelters. The temporary camp is located 200 meters from the permanent camp. It is built among bushes and big trees near a stream (pl. 2).



Pl. 2. The temporary camp of Sakai

In this particular camp the four shelters are made in the traditional Sakai style. Many kinds of big leaves may be used except palm for roofing as well as sitting or sleeping ground cover. The camp is cool and shady and truly used during hot weather. As in the permanent camp, here the head-man shelter is surrounded by his children and their families.

Until recently the Sakai stayed in rockshelter or caves not far from the permanent-camp during the rainy season to avoid heavy rain and flood. The rockshelters that they used as habitation were "La Khon Kae". At the rockshelters they may make a slightly horizontal platform, or use many kinds of leaves placed on the ground for sleeping. During that time, the rockshelters become a habitation site where food preparation, eating, throwing away of garbage and sleeping activities were conducted. In the present time it is not necessary for the Nai Sang group to stay in the rockshelters and caves because they were often disturbed by other people.

In the past, the Sakai would place his head towards the mouth of the cave or outside while sleeping, lie on his side so he can be awakened easily if there is a need to escape from enemies, especially tiger. Nowadays, they sleep with the head oriented to the north because no more danger from attacks of big animals (tiger, elephant, bear, etc) in the jungle during the night.

2.3 Material Culture

Generally house compositions of the Sakai shelters is both the permanent and temporary camps including the cave is composed of the sleeping and cooking areas. The firepit is a very important feature. A nuclear family usually has two or three firepits, one used for cooking and the others for warming. A single adult if he sleeps alone, has only one firepit which is only used for warming because he eats with the parents. In making shelter, the joints are tied very well with rattan, and although they now use nails in putting up permanent huts, they still do not know how to put and use nails properly.

Creating fire is done through the function of a rattan stick held vertically on

another rattan horizontally laid on thin wood fibers nearby to catch the spark erected. Since making fire is difficult, the Sakai do not put out embers in the camp even when the firepit is momentarily unused. When transferring to another settlement site they carry a burning wood from former camp to a new camp to start a new firepit. Nowadays, a plastic fuel lighter is conventionally used. The Sakai knows several methods of building firepits for cooking, and there are as follows :

1. Three pebble stones may be used as tripod (pl. 3)
2. Three big rattan stems may be used as tripod
3. Combination of the same height of a stone and two rattan sticks may be used as tripod



Pl. 3. The firepit with tripod stones for cooking at the temporary camp

The three techniques of building firepit for warning are as follows :

1. Putting woods on the ground is used to start fire. This method is often used in the temporary camps and caves, and in the firepit of single adult.
2. A low raised firepit on a platform is constructed on the same level and adjoining a raised sleeping or lying platform in the permanent hut. The wide open box-like firepit is created by putting mud on banana leaves, laid on the firepit platform. When the mud is slightly dried, wood is put to make fire. This method is useful during rainy season because the fire cannot be put out by moisture.
3. Four to six pieces of big hard wood are placed on the ground and covered with clay to prevent the humidity in the camp.

The roofs of permanent huts are made from many kinds of palm leaves such as "Nao" (*arenga pinuata mere*), "Rakam" (*salacca rumphii mall*), etc. The roof wall of temporary hut or lean may be made from any leaves, however "Rud" (*Zingiberaceae*) and banana leaves are abundant in the area and most commonly used.

In the permanent hut, the periphery may have a configuration of wood where banana leaves may be added to complete it as a roof adjoining the main roof to prevent them from rain. To the Sakai, there is a natural need for wind and light inside the shelter hut. There is also a need to regulate these atmosphere, not too much and not too little, just enough.

The permanent house has one or two wall which may be made by using a combination of bamboo slats and palm leaves. In temporary camp the dwelling has no wall because there is no strong wind to bother them in the front of cave.

Each married couple has a firepit for cooking their own hut. Sometime a shelf is built on one side high above the firepit. This high raised shelf is used to keep cooking utensils and food.

Most of the tools and utensils used by the Sakai are made from plant materials which can easily be obtained from the jungle. The best tool for

hunting is the blow pipe which is made from bamboo tube. The body a blow pipe is composed at two bamboo tubes join by resin from "han" tree (*canarium sp*). The dart used in this tool is made from "thao" (*pinanga limosa ride*) and "rakam" the pointed end contained poison extracted from another plant. The tool is used by inserting a dart into the blow pipe, then fix it with cotton from "Tao Rang" (*Cayota mitis lour*) and blow to the target.

Two kinds of utensil used by the Sakai in their dwelling are Basketry and Kitchen utensils. There are various kinds of baskets that the Sakai made and use, and these are as follws : "Chong" basket with a single handle and small in size used for keeping betel nut and piper leaf for the betel chew. "Yard" or "Cher" basket for keeping cloth, food plates, bowe, plastic water container, etc. "Yard" basket for stone hunting equipment and is usually large in size and has two handles on each side.

"Sorb" envelop the open side of which is covered with another envelop of slightly layer size. It is made by women from pandan leaves and is used to keep valuable objects like money, medicine plants, tobacco, etc., and "matig women" from pandan leaves and is used for sleeping or lying on. Bamboo tube container for water, pincer or tong made from a piece of rattan cut length wise and folded at the middle. It is used for picking up food or wood and charcoae or ember from the fire. Spatula made of finely carried rattan is used for stiring food in a usual during cooling. Bowl made from polished half of coconut. Mortar and pestle made from a hard wood plant is used for pounding in husked rice, this way be apted from the vil-lager. Gerinding stone made of pobble stone to keep bladed tools sharp. Pick made from monkey bone is used to pull out the cove from "Han" seed, and may also be used to pick anything from Sakai skin. Nowadays the Sakai already use in their daily life glass, plastic and alluminium utensils.

2.4 Subsistence Activities

How food is obtained and eating habits. The staple food of the Sakai are

wild yams but animals, medicine plants, fruits and vegetables are also eaten as supplementary food, however the availability of the later groups of food depends on its seasonality. The Sakai know more than ten varieties of edible wild yam and twenty kinds of edible medicinal plants. Edible animals include the following terrestrial animals such as monkeys, ant, catu, pangolin, hogbadger (earth pig), wild pig, other, porcupine and squirrel; reptiles such as turtle, lizards, snake, etc. Fresh water animals like crabs, freshwater fish and shells. However, the most referenced animal food is monkey. The three ways of getting food are as follows :

1. Hunting wild animals with the use of blow pipe, traps and catching with the use of hands.
2. Gathering wild product by their own method honey and others.
3. Cultivation of rice which they learned from the villagers. Methods of cooking raw or fresh food are as follows; learn anything regarding survival very fast.

2.5 Recreation and Hobbies

The "Noi Sang" groups were influenced by the villagers in their recreation and hobbies such as smoking tobacco, chewing betel nut and piper leaf, playing "takraw" (a ball of woven rattan strips), watching night movies at the lowland village and listening to the radio acquired through barter of honey. Nevertheless, even with the change of their environment, their beliefs and social way remained unchanged.

2.6 Social Organization

The kinship system of Sakai is that of an extended family. There are three generations of members staying as a family : the grandparents, the second the generation of ego and the ego's children. The oldest man becomes the leader of groups. Everyone helps the member who has a problem, and in the jungle problem are solved peacefully. Sometimes, some members of this hunter-gatherer group may move to seek food since everybody has duty to produce food. However, a member will only hunt or gather the food that

he likes and share this with the other.

The Sakai marriage system is exogamy and monogami. Usually the men will go to visit various groups and look for prospective wives. The prospective partner decides if they want to live as husband and wife, and if their parents approved that they are considered married and is totally accepted by the groups as husband and wife. They get married at age 16-30 years old. The married couples is expected to be diligent and they are good in hunting and gathering which they have learned in all of their lives.

About divorce, there are a few in the Sakai society. They have a very close relationship and each one cares for each other, but if a divorce occurs the sons or daughters can still marry until such time usually they stay with mother.

The Sakai do not physically punish their children, they give advice in order to train them. They are nonliterate, so the method of transferring of information from the past is through verbal communication. Most of their stories teach lesson and told of the rules of taboo of society. The way of life is taught to the children such as training the boy in hunting and gathering by the father and the girl is trained on making basketry and utensils by the women of the kin or mother.

III. Conclusion

Evidence of firepits was found in the sector of excavation, and associated finds, apart from charcoal, were animal bones, shells and seeds. The fires could have served for two main purposes, firstly, for cooking and secondly, for warm at night. The cooking fires could be distinguished with the presence of wooden tripods or hearth stones. Fires for warming did not have these features. These firing techniques have been observed to be still practised by the Sakai who presently live in the vicinity of the cave. They were reported to make fire by rubbing a rattan rod against a piece of bamboo (Jirawadee, 1992). The Sakai also straighten their blowpipes by heating them over fires.



From the observation and interviews on the present Sakai group in the area the identified plants from the excavation are still being used for food, for making tools and utensils, for making toys, for use on cooking tripod just like in the past. Most of the plants utilized for food bear fruit during the rainy season which could mean that the Sakai in the past stays in the vace probably in this time of the year, living in the cave was therefore seasonal.

Evidence from the excavation showed the Sakai preferred to cook their food before eating. Most of the plants retrieved from the excavation are still thriving in the jungle in this present time. Some have become difficult to find but can still be found in the dense forest.

REFERENCES

- Donner, Wolf, 1982. *The Five Faces Of Thailand*, An Economic Geography University Of Quensland press, St. Lucia.
- Jirawadee, Onwong, 1992. *Changes And Continue Of Sakai Society*, The Case Study On Chaobha Group, Palien, Trang, B.A. Thesis in Departement Of Antropology, Silpakron University, Bangkok.
- Oswalt, W.H., 1973. *The Ethnoarchaeology*, Institute of Archaeology, University Of California, Los Angeles.
- Peterson, W.E., 1974. *Anomalous Archaeology Site Of Northern Of Soutjheast Asian Prehistory*, Departement Of Anthropology, University Of Hawai.
- Pookayorn, Surin, 1983. *The camp of Mlabri People in Norther Thailand*, Departement of Antropology, Silpakron University, Bangkok.
- Watson, Patty Jo, 1979. "The Idea Of Ethnoarchaeology, Notes And Comments", *Ethnoarchaeology, Implications Of Ethnography For Archaeology*, Colombia University Press, New York.



Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Kaitannya dengan Pariwisata Bali*)

A.A. Gde Bagus

I. Pendahuluan

Perkembangan arkeologi sebagai ilmu dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan masyarakat, dewasa ini telah terjadi perubahan yang cukup mendasar. Secara kelembagaan orientasi arkeologi Indonesia telah bergeser ke arah pariwisata. Keadaan yang demikian ini menyebabkan arkeologi baik sebagai profesional maupun sebagai ilmu menghadapi dua masalah. Untuk itu para arkeolog khususnya maupun para ilmuwan harus mampu secara kreatif menemukan cara tentang bagaimana menerapkan ilmu arkeologi untuk menganalisis bidang-bidang yang bersifat non arkeologi. Dalam mengatasi dua masalah ini, maka arkeologi Indonesia perlu mencari alternatif pemecahannya yaitu antara lain dengan mengubah paradigma. Secara antropologis perubahan itu adalah dari peninggalan arkeologi sebagai *archaeology records* menjadi kebudayaan materi (Magetsari, 2003 : 3). Mengingat hal yang demikian itu, maka dalam seminar ini akan dibahas tentang "Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi Kaitannya dengan Pariwisata Bali".

Pariwisata sering diartikan sebagai pemanfaatan waktu luang untuk bepergian menikmati keindahan, baik yang berupa alam maupun budaya. Dengan perjalanan wisata sudah barang tentu seseorang ingin menikmati sesuatu yang lain dari apa yang biasa ia lihat dalam keseharian. Objek

*) Makalah ini disampaikan pada seminar "Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi" di Balai Arkeologi Denpasar, pada tanggal 8 Desember 2003.

wisata merupakan pesona tersendiri, selain itu kenyamanan, keamanan merupakan persyaratan yang mutlak harus dipenuhi. Kemungkinan suatu budaya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pengeluaran untuk wisata budaya akan semakin meningkat dibandingkan dengan wisata lainnya. Keunikan suatu budaya tertentu tidak mungkin dapat ditemukan di tempat lain, kecuali di tempatnya sendiri. Oleh karena itu untuk menikmatinya para wisatawan tidak mempunyai pilihan lain, kecuali harus datang ke tempat tersebut dan diperlukan biaya (Anom, 2001 : 1).

Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pilihan pada pengembangan pariwisata budaya dengan memanfaatkan potensi yang tersedia, termasuk sumberdaya arkeologi. Sumberdaya arkeologi dalam hal ini, yaitu tinggalan arkeologi apabila diperlukan dapat digunakan sebagai modal untuk tujuan sesuatu (pariwisata). Sumberdaya arkeologi sebagai sumberdaya budaya mempunyai nilai ilmu pengetahuan, estetika dan simbol-simbol tentang masa lalu sehingga sering menjadi objek atau daya tarik bagi wisatawan (Ardika, 2001 : 3). Mengenai pemanfaatan sumberdaya arkeologi untuk kepentingan pariwisata atau ekonomi dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, Bab IV, pasal 19 tentang *Benda Cagar Budaya (BCB)*. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, Bab V, pasal 30, tentang kepariwisataan, disebutkan bahwa masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Pemanfaatan kebudayaan sebagai objek wisata memang sangat menjanjikan, bahkan dalam visi tahun 2020 *World Tourism Organisation (WTO)* memprediksi bahwa wisata budaya akan merupakan salah satu dari segmen pasar pariwisata di masa yang akan datang. Namun kiranya patut diingat, bahwa ada semacam ketegangan antara manajemen kebudayaan termasuk juga alam dan kepariwisataan, dalam hal ini antara pariwisata, nilai budaya dan kelestarian tinggalan arkeologi (*BCB*). Dengan adanya ketegangan ini *UNESCO* menyebut pariwisata itu sebagai pedang bermata

dua. Artinya bahwa pariwisata budaya dapat mendorong hidupnya kembali tradisi, pemugaran serta pemeliharaan situs dan bangunan di satu pihak, tetapi pariwisata tak terkendali di lain pihak dapat menyebabkan dampak sebaliknya (Anom, 2001 : 3).

Patut diakui, bahwa dampak negatif di samping dampak positif dari pariwisata itu tetap ada. Di antara dampak negatif itu seperti konflik sosial, komersialisasi, merendahnya harga budaya dan tradisi, menjauhkan dan menghilangkan identitas budaya, merusak tradisi lokal, penyalahgunaan tradisi, meningkatnya perebutan keuntungan, perselisihan atas hak tanah, hilangnya keaslian dan nilai-nilai sejarah, industrialisasi, dan lain-lainnya. Dari dampak negatif tersebut yang cukup mengkhawatirkan yaitu meningkatnya perebutan keuntungan pada objek-objek wisata akan menimbulkan konflik sosial. Modernisasi yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi kepariwisataan dapat merusak lingkungan tinggalan arkeologi.

Bertitik tolak dari dampak negatif perkembangan pariwisata budaya di Bali tersebut, maka pengkajian terhadap pengelolaan sumberdaya arkeologi sangat diperlukan.

II. Pariwisata, Dampak dan Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi

2.1 Pariwisata Bali

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 1991 yang merupakan penyempurnaan dari Perda Nomor 3 Tahun 1994, Pemerintah Daerah Propinsi Tingkat I Bali telah menetapkan, bahwa kepariwisataan yang dikembangkan di Daerah Bali adalah pariwisata budaya, dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh agama Hindu, yang merupakan bagian kebudayaan Nasional sebagai potensi dasar yang dominan. Dalam konsep pengembangan pariwisata di Daerah Bali tersirat suatu cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan sehingga keduanya meningkat secara selaras, serasi dan

seimbang.

Sesuai pula dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990, Bab III, Pasal 16, bahwa Museum, Peninggalan Purbakala (Arkeologi), Peninggalan Sejarah dan Seni Budaya dapat dikategorikan sebagai objek dan daya tarik wisata merupakan hasil karya manusia. Di Bali sumberdaya arkeologi masih difungsikan dalam kehidupan masyarakat Hindu. Tidaklah berlebihan kalau dikatakan sumberdaya arkeologi merupakan *living monuments*, karena sampai saat ini peninggalan warisan budaya masa lalu masih tetap digunakan dan dikeramatkan sebagai media pemujaan oleh umat Hindu di Bali.

Struktur kebudayaan Bali dibangun melalui integrasi antara agama dan tradisi yang dilandasi oleh nilai-nilai dasar, yaitu nilai agama, estetika, solidaritas, dan nilai keseimbangan. Struktur tersebut dikokohkan dan dimantapkan dengan dukungan sistem sosial yang mapan. Sistem sosial tersebut merupakan lembaga-lembaga tradisional yang berkembang baik dalam sistem komunitas dan sistem kekerabatan masyarakat Bali (Mantra, 1996 : 25-26). Konsep-konsep dasar yang melandasi struktur kebudayaan Bali antara lain :

1. Rwa Bhineda
2. Desa Kala Patra
3. Tri Hita Karana

Kepariwisata Bali yang bermodal dasar kebudayaan daerah yang berwawasan lingkungan yang dijiwai oleh agama Hindu diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas, mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta pengenalan dan pemasaran produk daerah dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai-nilai agama dan kelestarian dan mutu lingkungan hidup (Anonim, 1998 : 17).

Dalam kode etik pariwisata dunia (Anom, 2001 : 4) ada beberapa pasal yang juga ditekankan seperti :

1. Pasal 3 ayat (1), menjadi kewajiban semua pelaku pembangunan pariwisata untuk menjaga kelestarian lingkungan alam
2. Pasal 4 ayat (2), kebijakan dan kegiatan harus diarahkan dalam rangka menghormati terhadap warisan seni, tinggalan arkeologi yang harus dilindungi dan diserahkan kepada generasi penerus.
3. Pasal 4 ayat (3) sumber penghasilan yang diperoleh dari wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat budaya dan monumen-monumen harus digunakan atau setidaknya sebagian untuk pemeliharaan, pelestarian dan pengembangan.

2.2 Dampak Pariwisata

Setiap pembangunan pada dasarnya akan menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif, yang merupakan realitas empiris yang sulit dielakkan fenomena positif dan negatif itu sesuai dengan konsep budaya Bali, yaitu konsep ***Rwa Bhineda***, yang bermakna bahwa dalam kehidupan ini nilai baik dan buruk, positif dan negatif adalah dua hal yang tidak dipisahkan dan selalu hadir menyertai kehidupan (Anonim, 1998 : 3).

Kepariwisata adalah industri yang sangat potensial, di samping telah memberikan dampak positif berupa penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan taraf perekonomian masyarakat daerah tujuan wisata setempat, mendorong hidupnya kembali dan pemeliharaan kerajinan tradisional, peningkatan penyediaan dana untuk pengelolaan dan pemeliharaan situs, sumberdaya arkeologi dan monumen, meningkatkan dukungan dan apresiasi dari masyarakat terhadap warisan budaya dan lain-lainnya. Sedangkan dampak negatifnya, yaitu terjadinya dinamika budaya dari agraris ke industri, terjadinya keresahan dan konflik sosial, komersialisasi dan merendahkan harga budaya dan tradisi, menjauhkan dan menghilangkan identitas budaya, terjadinya

penyalahgunaan tradisi, meningkatkan perebutan keuntungan, perselisihan atas hal tanah, hilangnya keaslian dan nilai-nilai sejarah, terjadinya budaya klasik yang spiritual ke budaya pasar yang komersial (Sujana, 1994 : 54 ; Anom, 2001 : 3).

Prof. Budhisantoso (1980 : 11-19), berpendapat, bahwa hal ini tidak perlu dirisaukan, karena terbatas di daerah-daerah tempat terjadinya interaksi antara wisatawan dengan penduduk setempat. Selanjutnya ia menambahkan agar penduduk di daerah wisata dipersiapkan sebaik-baiknya untuk menghadapi hal-hal yang mungkin dibawa oleh wisatawan.

Bali dalam pengembangan pariwisata budaya telah memanfaatkan potensi yang tersedia termasuk sumberdaya arkeologi. Dari paket-paket tour yang ditawarkan oleh pengusaha *Travel Agent*, sebagian besar juga terkait dengan *Benda Cagar Budaya*, seperti Goa Gajah, Tirtha Empul, Tanah Lot, Alas Kedaton, Pura Kehon, Pura Penulisan, Taman Ayun, Ulu Watu, dan lain-lainnya. Dengan adanya sumberdaya arkeologi (*BCB*) sebagai objek wisata, dampak negatif yang cukup memprihatinkan yaitu, terjadinya pengrusakan dan corat-coret yang terasa mengganggu, terjadinya perdagangan dan pencurian benda-benda arkeologi yang masih merupakan *living monuments*. Benda ini memiliki nilai ganda yaitu sebagai bukti sejarah dan sebagai benda bermakna religius yang menyangkut kepentingan masyarakat atau desa adat tertentu (Sutaba, 1991 : 24). Segala bentuk ancaman yang berasal dari manusia memang sulit sekali ditangkal. Memang diakui oleh para arkeolog, bahwa pencurian, perburuan benda-benda arkeologi hampir sama dengan umur manusia (Tjandrasasmita, 1981 : 97) Untuk menghindari lenyapnya tinggalan arkeologi, maka pemerintah Republik Indonesia membuat Undang-Undang Cagar Budaya, yaitu UU. No. 5 Tahun 1992. Di dalam bab III Pasal 27 disebutkan barang siapa dengan sengaja melakukan pencurian benda cagar budaya atau benda-benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya dengan cara penggalian atau dengan pencarian lain tanpa izin dari pemerintah sebagai dimaksudkan dalam Pasal 12 Ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Dampak negatif lain yang dapat merusak lingkungan situs arkeologi (*BCB*) adalah kemajuan pembangunan antara lain industrialisasi, modernisasi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi dari kepariwisataan. Dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan memerlukan pembukaan kawasan atau daerah, kadang-kadang ada juga gangguan terhadap lingkungan dan pelestarian tinggalan arkeologi (Sutaba, 1991 : 26).

Dalam proses pembangunan kepariwisataan di Bali keterlibatan masyarakat lokal sangat minim. Masyarakat lokal hampir tidak pernah dilibatkan di dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk menolak apabila ada pembangunan yang tidak sesuai dengan alam lingkungan fisik serta nilai sosial budaya di daerahnya. Pembangunan pariwisata Bali selain tidak berpihak pada lingkungan juga tidak menempatkan masyarakat Bali sebagai subjek yang menjadi tujuan utama (Ardika, 2001 : 4).

Jadi dampak apa pun yang ditumbuhkan oleh perkembangan pariwisata budaya terutama terhadap objek-objek yang memiliki sumberdaya arkeologi (*BCB*), perlu kiranya mendapat perhatian yang serius. Berbagai usaha yang dapat dilakukan yang sebelumnya tentu perlu dikaji dengan cermat dengan tidak hanya melibatkan para perencana yang tidak terbiasa dengan alasan dalam perencanaan, tetapi mengajak kaum pratisi yang mungkin mempunyai pengalaman langsung di lapangan, para ahli arkeologi dan unsur-unsur masyarakat (Desa Adat). Desa Adat dalam hal ini memegang kunci terhadap pelestarian terhadap tinggalan arkeologi beserta lingkungannya, yang sekaligus juga *penyungsung*nya.

2.3 Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi sebagai Objek Pariwisata

Munculnya berbagai persoalan dalam pembangunan pariwisata di Indonesia umumnya dan di Bali khususnya, berimplikasi terhadap perkembangan wacana-wacana untuk menuju paradigma baru dalam kepariwisataan yang dikenal dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah pembangunan pariwisata yang berpihak atau mengutamakan masyarakat.

Terkait dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, Gde Ardika (2001 : 4 - 5) mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang bertumpu dan berpihak pada rakyat atau masyarakat luas. Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang melibatkan rakyat sebagai penyelenggara dan hasil-hasil yang diperoleh harus diperuntukkan untuk rakyat. Pembangunan yang berpihak pada rakyat pada dasarnya mengandung dua dimensi yaitu :

1. Dimensi orientasi, yakni sasaran kebijakan yang diproduksi diorientasikan kepada rakyat banyak.
2. Dimensi keterlibatan atau partisipasi, yakni sasaran kebijakan yang diproduksi pembangunan tidak hanya dijalankan dan dikendalikan oleh beberapa pemilik modal atau kelompok saja, melainkan merupakan upaya seluruh kepentingan rakyat.

Pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini dengan arah kebijakan:

1. Memberi peluang dan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam pembangunan kepariwisataan, sehingga masyarakat mendapat manfaat yang akurat dan andil dari hasil-hasil pembangunan.
2. Memperkuat kedudukan dan perekonomian rakyat dalam perekonomian nasional, diupayakan untuk mendorong percepatan perubahan struktural yang memerlukan langkah-langkah yang mendasar meliputi, penglokasian sumberdaya, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan sumberdaya manusia atau masyarakat.
3. Masyarakat diikutsertakan atau bahkan diberi kebebasan untuk menentukan apa yang diinginkan bagi dirinya dan bukan ditetapkan oleh birokrasi. Yang penting dalam hal ini adalah menangkap aspirasi masyarakat dan kemampuan untuk menterjemahkan aspirasinya kedalam kegiatan-kegiatan

pembangunan.

4. Pariwisata berbasis masyarakat dikembangkan dalam konsep pariwisata inti rakyat. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan produk wisata yang bercirikan lokal sebagai modal dasar perencanaan dan pemasaran produk, di lain pihak akan dapat menciptakan ketahanan dan kestabilan sosial ekonomi rakyat.

Menurut Nasikun (1999 : 10), bahwa pembangunan berbasis masyarakat mempunyai ciri-ciri : (1) Memberikan peluang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat lokal untuk melibatkan diri di dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam menikmati keuntungan perkembangan industri pariwisata, dan oleh karena itu lebih memberdayakan masyarakat. (2) Memiliki peluang lebih mampu mengembangkan objek-objek dan atraksi-atraksi wisata berskala kecil, oleh karena itu dapat dikelola oleh komunitas-komunitas dan pengusaha-pengusaha lokal, sehingga menimbulkan dampak sosial besar untuk diterima oleh masyarakat (3) Bersahabat dengan lingkungan, secara ekologis aman, dan tidak memberikan dampak negatif.

Di Bali pemberdayaan masyarakat khususnya Desa Adat dalam pembangunan pariwisata sesungguhnya telah tertuang di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1991, tentang Pariwisata Budaya. Pada Pasal 8 Ayat (1) disebutkan bahwa pengusaha objek dan daya tarik wisata dapat dilakukan oleh lembaga adat (Desa Adat), badan usaha atau perorangan. Selanjutnya Pasal 12 Ayat (1) disebutkan pemerintah daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperanserta dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Pada Ayat (2) disebutkan dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Seperti telah disebutkan di depan, bahwa Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pariwisata budaya, dengan memanfaatkan potensi yang tersedia termasuk sumberdaya arkeologi dan secara keseluruhan sumberdaya arkeologi tersebut berada di wilayah Desa Adat.

Menurut Perda No. 6 Tahun 1986, dinyatakan bahwa Desa Adat merupakan kesatuan hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang mempunyai satu kesatuan tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* yang mempunyai wilayah tertentu dan kekayaan serta mengurus rumahtangganya sendiri.

Desa Adat juga mempunyai peranannya dalam aspek politik, ekonomi budaya dan relegi (Surpha, 1991 : 53).

Dengan memperhatikan besarnya peranan Desa Adat di dalam mengorganisir masyarakat dalam kegiatan, maka perlu diperdayakan keberadaan dari Desa Adat tersebut dalam rangka demokratisasi ekonomi berbasis kerakyatan dalam kaitannya dengan pembangunan pariwisata budaya, antara lain : (1) Keterlibatan Desa Adat di dalam setiap kegiatan pembangunan pariwisata baik dari sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga keberadaan pariwisata benar-benar dirasakan hikmahnya di tengah-tengah masyarakat. (2) Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada Desa Adat dalam keikutsertaan mengelola memelihara, melestarikan aset pariwisata yang ada di desanya, serta mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut. (3) Pemberian kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat di daerah pariwisata untuk berusaha, mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan memperoleh pendapatan dan kehidupan yang layak dari pariwisata (Kanwil Deparsenibud Bali, 2000 : 10).

Untuk pengelolaan sumberdaya arkeologi dalam mengatasi dampak negatif dari perkembangan pariwisata Bali, sangatlah tepat diperdayakan Desa Adat. Masyarakat sebagai salah satu *Stakehalder*, yaitu sebagai pewaris dan sekaligus pemilik tinggalan arkeologi harus dilibatkan pengelolaannya. Masyarakat lokal memiliki hak asasi untuk menginterpretasikan, memelihara dan mengelola tinggalan arkeologi yang mereka miliki. Dalam dunia arkeologi hal ini dikenal dengan publik arkeologi. Kearifan lokal maupun tradisi yang berkembang di masyarakat bersangkutan dalam pengelolaan tinggalan arkeologi tetap terpelihara. Pemerintah atau instansi yang berwenang hanya sebagai pasilitator dalam

pengelolaan tinggalan arkeologi bersangkutan (Ardika, 2001 : 2 - 3).

Untuk melestarikan sumberdaya budaya lokal, seperti sumberdaya arkeologi, maka pemberdayaan masyarakat setempat atau penduduk lokal seharusnya mendapat perhatian yang paling besar. Dalam hal ini yang seharusnya mendapat perhatian ialah, masyarakat yang bermukim di situs-situs arkeologi yang potensial atau yang berada di sekitarnya.

Dari beberapa objek wisata arkeologi di Bali yang sudah menerapkan pengelolaan berbasis masyarakat khususnya oleh Desa Adat, ada dua tempat yaitu : objek wisata Tanah Lot dan Alas Kedaton, Tabanan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan di kedua tempat tersebut, telah memberikan manfaat terhadap Desa Adat yaitu meningkatkan pendapatan Desa Adat melalui distribusi seperti karcis masuk, parkir dan dagang. Penghasilan yang diperoleh oleh Desa Adat kemudian didistribusikan lagi ke Banjar-Banjar Adat yang dipergunakan untuk perbaikan bangunan suci dan membiayai upacara *piodalan*. Bagi warga masyarakat yaitu bisa meningkatkan pendapatan secara formal dan non formal. Secara formal melalui pengangkatan tenaga kerja yang disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki (*SDM*). Secara non formal, sebagai pedagang kerajinan, pakaian dan minuman. Sedangkan untuk pemerintah khususnya Pemerintah daerah pemasukan devisanya masih tetap ada, sesuai dengan perjanjian dengan Desa Adat sebagai pengelola.

Desa Adat sebagai pengelola sumberdaya arkeologi dalam pengembangan objek wisata, beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Desa Adat harus tetap mempertahankan kesucian objek (pura dengan sumberdaya arkeologi yang tersimpan di dalamnya baik itu arca, candi dan lain-lainnya), yang masih dihormati dan disakralkan, merupakan warisan leluhur terdahulu yang mempunyai nilai seni, arsitektur dan religi yang cukup tinggi.
2. Desa Adat harus dapat mengamankan sumberdaya arkeologi dari pencurian.
3. Desa Adat harus tetap dapat mempertahankan keaslian lingkungan

situs (**BCB**) dari industrialisasi pariwisata.

4. Desa Adat dalam pemeliharaan sumberdaya arkeologi (**BCB**) hendaknya berhubungan dengan instansi terkait, yaitu Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, NTT di Bedulu Gianyar, sehingga dalam konservasinya tidak menyimpang dari ke arkeologian.
5. Desa Adat sedapat mungkin harus menyiapkan buku pemandu objek wisata yang isinya bersifat seni ilmiah tentang sejarah (pura, candi dan tinggalan arkeologi lainnya). Dalam pembuatan booklet bisa bekerja sama dengan instansi terkait seperti : Balai Arkeologi Denpasar, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Bali, NTB, NTT di Bedulu Gianyar, Fakultas Sastra Jurusan Arkeologi, dan lain-lainnya.
6. Desa Adat harus memahami pengetahuan kearkeologian, seperti pengenalan, pemahaman, dan penghayatan terhadap nilai-nilai luhur yang dikandungnya.

Untuk sumberdaya arkeologi di daerah lainnya di Bali yang dijadikan objek pariwisata, diharapkan di dalam pengelolaannya berbasis masyarakat khususnya oleh Desa Adat. Karena sistem pengelolaan tersebut memberikan manfaat yang cukup besar, baik terhadap sumberdaya arkeologi maupun masyarakat. Masyarakat lokal sebagai pemilik sumberdaya arkeologi (tinggalan arkeologi) seringkali juga tidak memahami nilai dan makna yang dikandungnya. Dalam konteks ini para ahli arkeologi harus mampu dan menyampaikan berbagai informasi yang dimiliki tinggalan arkeologi kepada masyarakat. Melalui informasi tersebut, pemahaman masyarakat lokal akan semakin meningkat terhadap nilai dan makna sumberdaya arkeologi, sehingga kesucian dan kelestariannya dapat dipertahankan.

III. Penutup

Bali dalam pembangunan pariwisata telah menetapkan pembangunan pariwisata budaya, termasuk di dalamnya sumberdaya arkeologi yang

tersebar di seluruh daerah. Semakin pesatnya perkembangan pembangunan pariwisata Bali, maka muncullah berbagai dampak, positif maupun negatif. Dampak positif, meningkatnya devisa negara dan daerah, meningkatnya konservasi dan pemugaran terhadap sumberdaya arkeologi dan lain-lainnya. Dampak negatif, seperti terjadinya pencurian benda-benda arkeologi, perebutan keuntungan sehingga terjadi konflik sosial, adanya gangguan lingkungan di objek-objek pariwisata dengan adanya industrialisasi. Untuk menangkal dampak negatif yang lebih parah lagi terhadap pembangunan pariwisata Bali, maka muncullah paradigma baru, yaitu pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, khususnya di Bali, dengan memperdayakan Desa Adat. Karena sumberdaya arkeologi sebagai objek pariwisata di Bali masih *living monuments* dan berada di lingkungan Desa Adat.

Pengelolaan berbasis masyarakat, khususnya oleh Desa Adat, mempunyai manfaat yang cukup besar, yaitu bagi sumberdaya arkeologi : kesucian, kelestariannya dapat terlindungi. Sedangkan bagi Desa Adat : meningkatkan pendapatan Desa Adat, meningkatkan pendapatan warga Desa Adat secara formal, yaitu pengangkatan tenaga kerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki (*SDM*) dan meningkatkan pendapatan warga secara non formal yaitu membuka usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I.G.N., 2001. "Keberagaman Budaya Daerah Sebagai Potensi Pariwisata." Paper.
- Anonim, 1998. *Pariwisata Untuk Bali Konsep dan Implementasi Pariwisata Berwawasan Lingkungan*, Denpasar, Biro Humas dan Protokol Setwilda Bali.
- Ardika, Gede, 2001a. *Paradigma Baru Pariwisata Kerakyatan Berkesinambungan*, Jakarta, Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata.

- , 2001b. "Pembangunan Pariwisata Bali Berkelanjutan Yang Berbasis Kerakyatan". Makalah Dalam *Seminar Nasional Bali. The Last or The Last Paradis*. Denpasar, Program Studi Diploma dan Pariwisata.
- Ardika, Wayan, 2001. "Pengelolaan Sumberdaya Budaya Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah" Dalam Buku *Manfaat Sumberdaya Arkeologi Untuk Memperkokoh Integrasi Bangsa*. Upada Sastra, Hal. 19-26.
- Budhisantoso, 1980. "Pariwisata dan Pengaruhnya Terhadap Nilai-nilai Budaya Bangsa", *Analisis Kebudayaan*, Tahun 1 No. 1 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta. Hal. 11-19.
- Kanwil Deppansbud Bali, 2000. "Pengembangan Pariwisata dan Pemberdayaan Desa Adat", Dalam *Eksistensi Desa Adat, Budaya dan Pariwisata*, Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan Dengan Nusantara, Aneka Jasa Abadi, Hal. 5-12.
- Mantra. I.B., 1996. *Landasan Kebudayaan Bali*, Yayasan Dharma Sastra, Denpasar.
- Magetsari, Noerhadi, 2003. "Paradigma Baru Arkeologi", Dalam *Newsletter IAAI* Volume 2. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia, Hal. 3.
- Nasikun, 1995. *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sujana, Nyoman Naya, 1994. "Manusia Bali di Persimpangan Jalan", Dalam Pitana (ed). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali* Denpasar : PT. Bali Post.
- Surpha, I Nyoman, 1991. *Eksistensi Desa Adat di Bali* Denpasar : Upada Sastra.
- Sutaba, I Made, 1991. *Pelestarian Peninggalan Purbakala di Daerah Bali Dalam Pembangunan Berwawasan Budaya*, Fakultas Sastra Warmadewa, Denpasar.
- Tjandrasasmita, Uka, 1981. "Usaha-Usaha Pemugaran Dan Perlindungan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Serta Usaha Pemantapannya" *Analisis Kebudayaan* Th. II No. 1.

Prospek Penelitian Epigrafi di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Denpasar

Oleh I Gusti Made Suarbhawa

I. Pendahuluan

Balai Arkeologi Denpasar sebagai salah satu jajaran Pusat Penelitian Arkeologi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) organik pusat di daerah dengan wilayah kerja meliputi Propinsi Bali, NTB, dan NTT. Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan penelitian di bidang arkeologi, yakni menggali dan mengkaji sumberdaya arkeologi di wilayah operasional dalam rangka memberikan kontribusi terhadap upaya Pusat Penelitian Arkeologi untuk memantapkan diri, serta meningkatkan peranan sebagai sebuah lembaga penelitian. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mensosialisasikan dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian. Hal ini wajar dan mendesak harus dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

Salah satu bidang kajian yang telah dikembangkan di Balai Arkeologi Denpasar adalah bidang epigrafi. Sesungguhnya epigrafi di Indonesia berkembang sejak abad ke-19 dengan objek penelitian benda-benda bertulisan atau lebih khusus berupa tulisan-tulisan kuno. Sementara ini pada beberapa kalangan terdapat beberapa pandangan mengenai eksistensi epigrafi. Ayatrohaedi (1991) dan Tjahjono Prasodjo (1992) menyatakan epigrafi merupakan bagian dari ilmu sejarah dan bukan arkeologi. Arkeologi cenderung mengolah data dari artefak, fitur, dan ekofak dengan memperhatikan konteksnya, sedangkan epigrafi lebih menghususkan kepada



kajian data tekstual atau sumber tertulis. Dalam konteks ini, epigrafi merupakan ilmu bantu arkeologi.

Selain pandangan di atas, beberapa kalangan mengatakan, bahwa epigrafi merupakan salah satu bidang kajian yang cukup penting dari studi arkeologi Indonesia. Bahkan dalam studi arkeologi Indonesia, penggunaan pendekatan sumber tertulis cukup signifikan. Di sini, epigrafi mampu menjelaskan pemikiran, gagasan masyarakat, dan meletakkan suatu karya dalam titik waktu. Dapat epigrafi memungkinkan berbicara secara langsung dan bukan sekadar berperan sebagai unsur penunjang data kontekstual, melainkan sebagai perantara yang mampu menghubungkan antara benda dengan kisah sejarah (Magetsari, 1986 : 91-91; Sedyawati, 1994 : 4; Kartakusumah, 2001 : 3). Terlepas dari pandangan di atas, dalam kenyataannya, kajian epigrafi di Indonesia merupakan bagian dari arkeologi. Hal ini jelas terlihat secara kelembagaan, yakni Pusat Penelitian Arkeologi dengan jajarannya sebagai lembaga penelitian, Direktorat Sejarah dan Purbakala dan jajarannya sebagai lembaga pelestarian dan perlindungan, demikian pula pada lembaga pendidikan tinggi yaitu di Jurusan Arkeologi Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada dan Universitas Udayana.

Berkait erat dengan penelitian epigrafi di wilayah Balai Arkeologi Denpasar, sangat menarik permasalahannya untuk dibahas adalah :

- a. Upaya apa yang telah dilakukan sampai saat ini
- b. Apa kendala-kendala yang dihadapi
- c. Bagaimana harapan dan solusi yang akan ditempuh

Ketiga butir permasalahan itu dikemukakan bertujuan untuk mengetahui dan memahami perkembangan epigrafi dalam lingkup terbatas di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar dalam konteksnya dengan epigrafi Indonesia dan lebih luas lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan arkeologi. Selain itu, untuk ke depan berupaya untuk mencari dan menumbuhkembangkan aspek-aspek bahasan yang layak relevan bagi tuntutan zaman.

Untuk menjawab permasalahan dan pencapaian di atas, maka digunakan beberapa metode. Metode kepustakaan terutama digunakan untuk menelaah

hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebelum penelitian dilakukan oleh Balai Arkeologi. Terhadap prasasti yang dapat diteliti, secara langsung dilakukan metode analisis fisik dan non fisik. Dalam konteks ini analisis fisik antara lain meliputi analisis bentuk, bahan, ukuran, keutuhan, jumlah lempengan, jumlah baris dan tanda-tanda khusus. Analisis nonfisik antara lain meliputi transkripsi, transliterasi, analisis struktur isi dan analisis komparatif.

II. Perkembangan Penelitian

Penelitian epigrafi di wilayah operasional Balai Arkeologi Denpasar sudah banyak dilakukan oleh para ahli yang berkecimpung dalam bidang ini. Penelitian para ahli dan pemerhati lebih terfokus di Bali. Penelitian diawali oleh van der Tuuk dan J.L.A. Brandes pada tahun 1885. Dalam penelitian ini ditelaah tiga buah prasasti yang berasal dari Desa Blantih yang disimpan di Desa Sawan dan Sangsit. Kemudian pada tahun 1889, Brandes membahas sebuah prasasti dari Klandis dan lima buah prasasti yang disimpan di Desa Julah. Dalam kedua telaah ini, Brandes telah berusaha melengkapi dengan faximile dari masing-masing prasasti meskipun tidak secara khusus menampilkan kajian palaeografi.

Berselang sekitar 25 tahun setelah penelitian van der Tuuk dan Brandes, pada tahun 1926 van Stein Callenfels menerbitkan hasil penelitiannya. Penelitiannya mencakup sebanyak 25 buah prasasti yang berasal dari Kabupaten Karangasem, Bangli, Klungkung, dan Tabanan. Hasil penelitiannya berupa teks alih aksara prasasti, dan pada bagian pengantar disertai beberapa komentar berkait dengan hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penelitian (Callenfels, 1926).

Pada tahun 1929 dan 1930, Callenfels lagi menerbitkan hasil penelitiannya dalam buku *Oudheden van Bali*. Dalam buku ini antara lain dibahas prasasti-prasasti yang terdapat pada arca-arca yang tersimpan pada beberapa *pura* di Pejeng, Bedulu, Gunung Kawi, dan Gunung Penulisan. Berdasarkan kajian prasasti-prasasti tersebut, oleh Stutterheim juga

dikemukakan periodisasi arca yang berasal dari daerah Gunung Penulisan hingga sekitar Pejeng, Bedulu.

R. Goris merupakan ahli yang banyak berkecimpung dalam penelitian epigrafi Bali. Berdasarkan foto-foto yang dibuat atas perintah Residen Caron mulai tahun 1929 sampai dengan tahun 1957, maka terbit beberapa buah karya Goris. Beberapa di antara hasil penelitian Goris sampai saat ini dipakai sebagai acuan utama untuk meneliti epigrafi Bali. Hasil karya yang sangat penting tersebut adalah buku *Prasasti Bali I* dan *Prasasti Bali II*. Dalam buku pertama dimuat keterangan singkat 175 buah prasasti, yaitu nama prasasti, nama raja yang mengeluarkan, dan tipe huruf. Dari 175 buah prasasti yang disebutkan ini, hanya dimuat 41 buah teks ditambah dengan dua buah prasasti yang berbahasa Sanskerta yang terdapat di *Pura Pegulingan*, Pejeng. Di antara 41 buah teks prasasti tersebut, sepuluh buah di antaranya telah dimuat dalam *Epigraphia Balica I* oleh Callenfels. Dalam buku kedua (*Prasasti Bali II*) dimuat terjemahan teks prasasti yang terdapat dalam buku pertama (*Prasasti Bali I*) dalam bahasa Belanda serta ringkasan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Selain itu, pada bagian akhir ditampilkan glosary dari kata-kata prasasti tersebut.

Putra Indonesia yang memelopori penelitian epigrafi Bali adalah Ktut Ginarsa yang antara lain hasil penelitiannya membahas prasasti di Desa Tengkulak dan prasasti yang tersimpan di Desa Tejakula. Selanjutnya, Sukarto Karto Atmojo berhasil meneliti beberapa prasasti temuan baru, antara lain adalah prasasti Asah Duren, Prasasti Den Kayu, prasasti Kerobokan, prasasti Kapal. Kajian terhadap prasasti-prasasti tersebut dimuat dalam *BKI* dan *MISI* ataupun disampaikan sebagai kertas kerja dalam seminar. Pada sebagian besar hasil penelitian ini dimuat alih aksara, alih bahasa, serta uraian-uraian yang berkenaan dengan isi prasasti.

Penelitian epigrafi Bali dalam tahun-tahun selanjutnya banyak dilakukan oleh Putu Budiastara dari Museum Bali. Lebih dari 30 buah prasasti telah diteliti, yang sebagian besar merupakan penelitian ulang yang sebelumnya sudah dibicarakan oleh Goris. Hasil penelitian Putu Budiastara umumnya berupa alih aksara dan alih bahasa prasasti serta uraian singkat isi prasasti.

Sayang sekali, pada sebagian besar laporan penelitian ini tidak disertakan foto prasasti yang bersangkutan. Demikian pula tanpa menyertakan kajian paleografi yang sesungguhnya merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kajian epigrafi.

Berkaitan dengan penelitian epigrafi Bali, yang perlu juga dihargai usaha Machi Suhadi yang berhasil menghimpun teks prasasti koleksi Goris dan Ktut Ginarsa yang disimpan di Gedung Kirtya Singaraja. Dalam karya ini dimuat 56 buah teks prasasti yang sebagian besar merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Jayapangus. Perlu juga ditegaskan, bahwa beberapa di antara teks ini sudah terbit dalam *Epigraphia Balica* dan *TBG*.

Pada tahun 1977 melalui Proyek Pengembangan Media Kebudayaan diteliti sejumlah prasasti yang tersebar pada beberapa tempat di Bali. Oleh karena terhalang oleh hambatan yang tidak terduga pada penelitian ini sebagian besar prasasti tidak dapat diteliti langsung, sehingga teks yang dimuat dalam laporannya merupakan salinan dari terbitan-terbitan sebelumnya. Bahkan dalam penelitian ini sama sekali tidak memuat ringkasan isi prasasti maupun alih bahasanya.

Semenjak berdirinya Balai Arkeologi tahun 1978, kegiatan penelitian epigrafi semakin meningkat. Daerah penelitian semakin melebar tidak terbatas hanya di Bali, tetapi sudah menjangkau daerah NTB, dan NTT. Harus diakui, sampai saat ini penelitian di daerah NTB dan NTT frekuensinya sangat jauh dibandingkan dengan Bali. Kesenjangan frekuensi penelitian daerah Bali dengan daerah lainnya dimungkinkan karena pada satu sisi penelitian epigrafi di Bali sudah dirintis jauh lebih awal. Pada sisi lain, disinyalir potensi objek epigrafi di daerah NTB dan NTT relatif lebih sedikit. Di samping itu, informasi berkenaan dengan objek epigrafi di kedua daerah ini yang berhasil dijangkau juga sangat jarang. Hal semacam itulah antara lain yang menyebabkan terjadinya kesenjangan penelitian di daerah-daerah tersebut. Di daerah NTB, objek epigrafi Hindu-Buddha sampai saat ini baru pada satu situs yakni Watu Tunti, dan NTT sampai saat ini prasasti belum ditemukan.

Berkaitan dengan penelitian epigrafi di Bali yang telah dirintis sejak

abad ke-19, sebetulnya baru menjangkau sebagian kecil saja. Berdasarkan catatan-catatan Goris dan temuan-temuan prasasti baru yang berhasil dijarah hingga terakhir sudah tercatat 244 buah prasasti, khususnya prasasti Hindu-Buddha (lihat tabel 1).

Tabel 1. Sebaran Prasasti di Bali

No.	Kabupaten/Kotamadya	Prasasti		Jumlah
		Logam	Batu	
1.	Badung	8	2	10
2.	Bangli	69	8	77
3.	Buleleng	40	1	42
4.	Denpasar	9	1	10
5.	Gianyar	30	25	55
6.	Jembrana	1	-	1
7.	Karangasem	19	2	21
8.	Klungkung	5	-	5
9.	Tabanan	18	6	24
	Jumlah	199	45	244

Sedangkan objek epigrafi Islam, epigrafi Cina dan yang lainnya jumlahnya belum diketahui dengan pasti. Sementara itu, hingga kini penelitian epigrafi Islam belum pernah dilakukan secara mandiri oleh Balai Arkeologi Denpasar. Kegiatan ini tercakup pada penelitian Islam secara umum yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar bersama Pusat Penelitian Arkeologi dengan menjangkau ketiga propinsi. Di antara tiga daerah ini, frekuensi penelitian paling banyak di NTB, disusul oleh Bali dan paling jarang di NTT. Porsi kegiatan seperti itu dapat dipahami mengingat objek penelitian epigrafi Islam lebih banyak tersebar di daerah NTB.

Terhitung dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2004 penelitian epigrafi

di Bali baru dipublikasikan dalam wujud Berita Penelitian Arkeologi sebanyak tiga buah, yaitu Laporan Penelitian Epigrafi Bali Tahap I (1977) Laporan Penelitian Epigrafi Tahap II (1986), dan Laporan Penelitian tiga buah prasasti dari Desa Sawan (2000). Tiga buah publikasi ini memuat 22 buah teks prasasti. Di samping itu juga, terdapat publikasi dalam bentuk artikel lepas sekitar sepuluh buah.

Sehubungan dengan penelitian epigrafi di Balai Arkeologi Denpasar pada dasarnya mencakup juga penelitian naskah atau lontar khususnya yang bernuansa Hindu-Buddha. Semenjak tahun 1991, tercatat 37 kali penelitian epigrafi yang diprogramkan dan 34 kali berupa penelitian insidental. Di antara 37 kali penelitian yang diprogramkan, lima kali dengan objek berupa naskah lontar, salah satu di antaranya naskah lontar di Museum NTB. Penelitian insidental sebagai tindak lanjut dari laporan masyarakat dilakukan sebanyak 17 kali dengan objek naskah lontar dan 17 kali dengan objek prasasti tembaga. Berkenaan dengan objek penelitian berupa naskah lontar sesungguhnya lebih dekat atau mungkin lebih tepat sebagai bidang kajian filologi. Akan tetapi, hal tersebut adalah suatu fenomena yang tidak dapat dihindari.

Terhadap objek penelitian yang berupa prasasti-prasasti logam ataupun batu, setidaknya telah dilakukan analisis epigrafi murni yakni mengidentifikasi, membaca, dan mengalihaksarakan, menerjemahkan dengan menyertakan catatan-catatan terjemahan, serta penafsiran isinya (Sedyawati, 2001 : 6-7). Sedangkan untuk objek penelitian berupa naskah lontar telah diupayakan sama halnya dengan prasasti-prasasti tembaga, tetapi akan lebih baik bila disertai dengan perlakuan melalui analisis filologi yang memadai.

III. Prospek dan Hambatan serta Harapan

Objek penelitian epigrafi secara bentang ruang dan bentang waktu sangat luas, bertebaran hampir di seluruh wilayah Indonesia, dalam berbagai ragam media dan bentuk presentasi (foto no. 1, 2, 3).



Foto 1. Prasasti Pura Waringin Pitu, Batungsel dengan media batu.

Foto 2. Prasasti Mayungan yang beraksara Jawa Kuno ditatah pada lempengan tembaga.



Foto 3. Naskah beraksara Bali Baru dengan media daun lontar.

Melihat jumlah objek penelitian yang relatif banyak, sedangkan objek yang sudah disentuh penelitian sangat sedikit, sungguh sangat memprihatinkan. Demikian pula tanpa mengurangi arti dan makna hasil penelitian terdahulu, penelitian ulang terhadap beberapa prasasti dengan secara langsung meneliti objeknya menunjukkan beberapa di antaranya perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan bahkan mesti ditinjau kembali. Objek penelitian epigrafi berupa sumber-sumber tertulis yang sangat memadai untuk kepentingan penelitian sejarah dan kebudayaan, terutama bila merupakan kesaksian tangan pertama yang disusun oleh bangsa atau kelompok masyarakat bersangkutan pada masanya (Subadio, 1991 : 1). Sehingga kajian epigrafi menjadi amat sentral bagi penulisan sejarah, baik dalam rekonstruksi sejarah, politik maupun sejarah sosial. Untuk dapat sampai pada tataran ini, tentu dibarengi dengan penggarapan analisis teknis dan pemaknaan interpretatif yang terarah dan mantap (Sedyawati, 2001 : 7-8).

Pada masa mendatang, penelitian epigrafi di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar harus ada solusi atau terobosan-terobosan yang mengarah pada suatu kemungkinan mengurangi kesenjangan penelitian antara satu daerah dengan daerah lain. Sementara ini di daerah NTT, penelitian sejenis sangat jarang dilakukan, maka perlu diambil langkah penjajagan untuk menjaring informasi seoptimal mungkin. Sedangkan untuk daerah NTB, yang sangat potensial dengan sumber data epigrafi, terutama epigrafi Islam dan sebagian epigrafi Hindu-Buddha, penelitiannya perlu diintensifkan. Bahkan sangat perlu dipikirkan untuk menyusuri lebih dalam pendapat Casparis yang menyatakan huruf Bima dan Sumbawa merupakan perkembangan huruf Jawa periode Majapahit atau Jawa Tengahan dari abad ke 13-15. Demikian pula khusus terhadap hasil penelitian prasasti Watutunti, perlu disosialisasikan dan diinformasikan kepada masyarakat setempat baik dalam bentuk terbitan ataupun media-media lain.

Selanjutnya, untuk daerah Bali yang penelitian sudah berjalan lebih lama, pada masa mendatang, penelitiannya lebih ditekankan pada pendalaman materi dan hasil pencapaiannya. Selain itu, hendaknya juga dipertimbangkan

aspek-aspek tertentu yang belum digarap tuntas oleh para peneliti terdahulu. Setelah hampir 50 tahun terbit, Prasasti Bali I, II semestinya merupakan pemacu sekaligus sebagai pemicu lahirnya buku sejenis. Terlebih lagi dengan adanya temuan prasasti baru belakangan ini relatif banyak. Kodifikasi prasasti Bali yang digagas oleh Machi Suhadi merupakan suatu rencana pekerjaan besar, kini baru berjalan sebagian kecil. Bagian-bagian lain dari rencana ini yang belum tergarap perlu ditindaklanjuti, mengingat teks prasasti untuk keperluan ini terkumpul sudah memadai.

Sementara ini, di kalangan para ahli dan pemerhati epigrafi seperti terdapat semacam kesepakatan formulasi prasasti-prasasti Bali. Selain daripada prasasti yang berbahasa Sanskerta, terdapat tiga formulasi, yaitu : formulasi *yumu pukatuhu*, formulasi *1 saka* atau *ing saka*, formulasi *mwah* atau *punah*. Hal ini diterima begitu saja tanpa ada yang mempersoalkan lebih lanjut. Celah yang perlu dicermati dari formulasi ini adalah prasasti tipe *punah* merupakan bagian atau kelanjutan dari suatu prasasti yang umumnya berangka tahun lebih tua. Menarik untuk disimak dan direnungkan apakah prasasti tersebut dibuat memang pada tahun berbeda ataukah pada tahun belakangan.

Serupa dan terkait erat dengan permasalahan formulasi prasasti, berkenaan dengan tipe aksara atau tinjauan paleografi oleh Goris, aksara prasasti Bali dikelompokkan menjadi tipe A, B, C. Ketiga kelompok prasasti ini tidak berdasarkan kronologis semata-mata, berdasarkan perbedaan dan persamaan aksara. Ditegaskan oleh beliau, bahwa prasasti-prasasti yang tertua (abad 9-10) mempunyai tipe aksara sama dengan tipe aksara Anak Wungsu dari masa belakangan. Menarik untuk dipersoalkan, apakah prasasti tipe tertua dibuat pada zaman Anak Wungsu ataukah sebaliknya, aksara tipe Anak Wungsu merupakan peniruan dari masa sebelumnya, mengingat antara masa-masa prasasti tertua dengan Anak Wungsu terdapat beberapa tipe aksara.

Banyak aspek yang sebetulnya perlu dikembangkan dalam penelitian epigrafi di wilayah kerja Balar Denpasar. Untuk tercapainya maksud-maksud tersebut tidaklah mudah karena berbagai persoalan dan hambatan

siap menghadang. Dengan memperhatikan banyak daerah yang belum terjamah penelitian dan banyak aspek yang perlu digarap dan minimnya publikasi, serta terbatasnya sumberdaya manusia (peneliti) dalam bidang ini merupakan salah satu hambatan yang cukup mengganggu. Penambahan atau pengadaan tenaga tidak serta merta akan memecahkan masalah ini. Terlebih dalam kondisi negara seperti sekarang dan komitmen pemerintah dengan pertumbuhan pegawai 0% bahkan cenderung untuk pengurangan pegawai. Selain itu, penambahan tenaga bukanlah suatu penyelesaian akhir. Dengan tenaga yang tersedia, perlu dioptimalkan dan dibarengi dengan peningkatan kualitasnya secara terencana, berkala dan berkesinambungan. Dalam waktu yang mendesak untuk memperluas dan menambah wawasan perlu dibuka kesempatan peluang mengikuti pelatihan-pelatihan. Di samping itu, sarana dan prasarana sekarang kondisi sudah tidak laik pakai. Sebagai contoh, misalnya kamera sebagai salah alat perekam data, sudah banyak yang rusak dan bahkan sudah ketinggalan zaman, perlu diremajakan dengan kamera digital. Demikian pula untuk keperluan pembuatan rubbing dan abclact hanya tersedia kertas singkong yang semestinya diperlukan juga bahan-bahan lain. Kondisi seperti itu merupakan hambatan yang sangat mengganggu kinerja. Dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sehingga diharapkan dapat memberikan dukungan yang optimal, sehingga kesenjangan dengan kebutuhan dapat diminimalisasi yang pada akhirnya terdapat keluaran yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan.

IV. Penutup

Kehadiran epigrafi dalam studi Arkeologi Indonesia ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Epigrafi sebagai bagian dari disiplin Arkeologi Indonesia ternyata telah mengembangkan teori dan metode yang disesuaikan dengan objek studi, dan bahkan juga dalam perkembangannya memanfaatkan ilmu-ilmu lain sebagai ilmu bantu.

Objek penelitian bidang kajian epigrafi relatif banyak dengan sebaran

yang cukup luas, sehingga dengan kondisi demikian banyak hal yang belum digarap. Dalam penggarapan juga belum merata, dengan artian pada daerah tertentu sudah ditangani relatif memadai, sedangkan pada daerah tertentu belum terjangkau. Di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar bidang kajian epigrafi dengan latar belakang Hindu-Buddha terkonsentrasi di Bali, dan sebagian kecil di NTB. Epigrafi dengan latar belakang Islam sebagian besar terdapat di NTB. Dan sebagian kecil di Bali. Sedangkan di NTT, potensi epigrafi belum diketahui dengan pasti.

Akhir-akhir ini pada beberapa kalangan masyarakat sudah timbul kesadaran akan pentingnya tinggalan arkeologi, lebih khusus lagi mengenai objek studi epigrafi. Sikap masyarakat seperti itu perlu disikapi dengan respon yang wajar dan cermat. Melihat banyak objek epigrafi yang belum tergarap dan sikap positif masyarakat, hal ini merupakan suatu tantangan besar, maka untuk ke depan penelitian di bidang ini perlu dikembangkan. Dalam pelaksanaannya tentu tetap mengacu kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta tetap tidak mengurangi ataupun mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah penelitian. Untuk tercapainya hal tersebut, sehingga perlu dibarengi dengan peningkatan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayatrohaedi, 1991. "Epigrafi Indonesia dan Perkembangan," paper dalam *Diskusi Ilmiah Epigrafi*, Yogyakarta 9-10 November 1991.
- Brandes J.L.A., 1985. "de Bronzen Platen van Sembiran (Boeileleng) Bali", *TBG*, XXXVII, p. 15-56.
- Ginarsa Ktut, 1973. "Prasasti Baru Raja Ragajaya 6 April 1155", *MISI*, V (1). Hal. 27-84.
- , 1961. "Prasasti Baru Raja Marakata", *Bahasa dan Budaya*, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Djakarta.
- Goris, Roclof, 1954. *Prasasti Bali* I, II, Masa Baru, Bandung.
- , 1965. *Ancient History of Bali*, Faculty of Letters, Udayana University, Denpasar.
- Kartakusuma, Richadiana, 2001. "Wahana Berpijak Epigrafis : Sumbangan Pemikiran terhadap Kajian Sumber Tertulis", paper *Seminar dan Kongres I Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia*, 28-30 Mei 2001 di Malang.
- Magetsari, Nurhadi, 1986. "Local Genius dalam Kehidupan Beragama", dalam Ayatrohaedi (Eds.), *Kepribadian Budaya Bangsa* (Local Genius), Pustaka Jaya, Jakarta.
- Prasodjo, Tjahjono, 1998. "Epigrafi Indonesia dan Pengembangannya", *Berkala Arkeologi*, Balai Arkeologi Yogyakarta.
- Sedyawati, Edi, 2001. "Epigrafi : Ajakan untuk Tekun dan Cermat", paper *Seminar dan Kongres I Asosiasi Ahli Epigrafi Indonesia*, 28-30 Mei 2001 di Malang.
- Subadyo, Haryati, 1991. "Relevansi Pernaskahan dengan Berbagai Ilmu," *Naskah dan Kita, Lembaran Sastra*, No. 12 I, 1991, FSUI, Jakarta, p. 1-17.
- Suhadi, Machi, 1979. "Himpunan Prasasti Bali", Naskah Tinggalan Goris dan Ktut Ginarsa.
- Stein Callenfels, PV., 1926. "Epigraphia Balica", *VBG*, 66, Kolff & Co,

Batavia.

Stuttheim, W.F., *Oudheden van Bali Het Oude Rijk van Pejeng*, Kirtya Lieftrick van der Tuuk, Singaraja.

Sukarto K. Atmodjo, M.M., dkk 1970. "Preliminary Report on the Copperplate Inscription of Asahduren", *BKI*, 126.

Sukarto K. Atmodjo., M.M., dkk., 1977. "Laporan Penelitian Epigrafi Bali Tahap I", *BPA* No. 11, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Departemen P dan K, Jakarta.

Penelitian Data Tekstual antara Harapan dan Kenyataan

I Nyoman Sunarya

A. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negeri dengan ribuan pulau yang sarat dengan budaya, merupakan suatu anugrah bagi bangsa Indonesia. Berkat sejumlah besar tinggalan kuno yang merupakan sisa-sisa kehidupan masa lampau berlanjut sampai tradisi yang ada sekarang, membuat Indonesia menjadi suatu kawasan penting di dunia dalam memahami peradaban manusia.

Pusat Penelitian Arkeologi sebagai institusi pemerintah, bertugas sebagai lembaga riset dalam menangani warisan budaya bangsa. Potensi sumberdaya budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia membuat Pusat Penelitian Arkeologi memiliki kedudukan strategis sebagai sebuah lembaga yang berwenang untuk meneliti kehidupan masa lampau, baik untuk kepentingan lokal, nasional, regional maupun internasional.

Dalam mengemban tugas untuk mengadakan penelitian sumberdaya arkeologi di seluruh wilayah nusantara, Pusat Penelitian Arkeologi memiliki Balai-balai Arkeologi yang berkedudukan di daerah. Balai-balai Arkeologi merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Penelitian Arkeologi dalam mengakselerasikan kemajuan arkeologi di tingkat lokal kewilayahan.

Balai Arkeologi Denpasar sebagai salah satu dari sepuluh Balai Arkeologi yang ada di Indonesia merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mewilayahi tiga propinsi, yakni Propinsi Bali, Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Balai Arkeologi



Denpasar yang merupakan jajaran Pusat Penelitian Arkeologi di daerah, menggali potensi di wilayah kerjanya. Upaya ini dilakukan agar dapat memberikan kontribusi di dalam pembangunan. Lebih-lebih dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah sejak bulan Mei 1999, maka sudah sepantasnya Balai Arkeologi Denpasar sebagai salah satu instansi penelitian di bidang kebudayaan wajib menggali potensi yang ada untuk diangkat ke permukaan agar dapat dijadikan masukan dalam ikut menentukan arah pembangunan di daerah. Hal ini didasarkan pada isi undang-undang tentang otonomi daerah di atas, yang menyatakan bahwa di masa mendatang sektor kebudayaan tidak lagi diurus oleh pusat, akan tetapi sudah menjadi tanggung jawab daerah untuk melaksanakannya, di samping sektor-sektor lain, seperti tercantum dalam pasal 9 ayat (2) "Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah meliputi : pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, tenaga kerja."

Penelitian merupakan jiwa dan dasar dari pendirian Balai Arkeologi maupun Pusat Penelitian Arkeologi. Oleh karena itu, penelitian merupakan kegiatan utama, di samping kegiatan lainnya seperti administrasi dan kerumahtanggaan.

Kegiatan penelitian yang akan dibicarakan pada kesempatan ini adalah kegiatan penelitian data tekstual yang merupakan salah satu dari kegiatan Balai Arkeologi Denpasar, di samping kegiatan lainnya seperti penelitian prehistori, Islam dan arkeometri. Pembicaraan akan menyangkut hal-hal seperti kegiatan penelitian data tekstual yang telah dilakukan selama ini, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya baik yang bersifat teknis maupun nonteknis dan pada bagian akhir disertai solusi mengenai kendala yang dihadapi. Oleh karena dalam tulisan ini lebih mengarah kepada suatu evaluasi, maka dalam pengumpulan dan analisis ditekankan kepada penggunaan metode perpustakaan.

B. Kegiatan Penelitian Data Teksual di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Denpasar

Pengertian sumber tertulis (data tekstual) mencakup semua dokumen tertulis yang memuat pikiran, perasaan, aturan-aturan dan sebagainya, sebagai hasil karya manusia di masa lampau. Sifatnya sebagai objek primer (*primary object*) membuat dokumen tertulis mampu berbicara dan memberikan informasi langsung tentang gagasan-gagasan, pemikiran tentang aspek-aspek kehidupan manusia yang melandasi karya-karya seni khususnya untuk suatu karya atau dokumen yang bersangkutan dalam titik waktu tertentu. Sumber tertulis terdiri dari prasasti dan naskah karya sastra juga berita asing.

Pada umumnya, prasasti merupakan maklumat yang isinya tentang perintah raja, pernyataan pujian atau putusan yang dikeluarkan oleh seorang raja atau pejabat tinggi suatu negara, sehingga ragam bahasa yang ditampilkan resmi sifatnya. Prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa klasik, terutama yang dikeluarkan oleh seorang raja, dapat dikatakan memiliki struktur yang konsisten dan informasi di dalamnya akurat dan dipercaya, misalnya tentang sistem pemerintahan, sistem peradilan, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi, sistem keagamaan dan sistem kesenian. Prasasti juga sering disebut dengan istilah inskripsi.

Naskah karya sastra sifatnya lebih terbuka, gaya bahasa dan bentuknya berupa gancaran atau prosa (karangan bebas), puisi atau kekawin. Pada umumnya naskah berisi cerita sejarah dan mengandung sisipan-sisipan seperti dongeng, mitos, legenda, dan fabel yang kurang kaitannya dengan peristiwa sejarah. Prasasti tergolong ke dalam dokumen resmi atau maklumat, sedangkan naskah menggunakan bahasa dan aksara yang lebih umum. Biasanya naskah memuat aturan-aturan tentang perikehidupan berbagai golongan masyarakat, sifatnya acapkali merajut dan menyambung kesenjangan-kesenjangan dalam prasasti.

Sumber berita asing tidak merupakan objek studi khusus, tetapi diperlakukan sebagai pelengkap sumber berita asing yang dipakai biasanya

yang sudah diterbitkan, merupakan laporan perjalanan orang asing seperti Cina, Arab, Portugis. Pengambilan bahasan ini bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakkan ilmu arkeologi, tetapi semata-mata didasarkan pada pertimbangan teknis.

Penelitian data tekstual di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar dibiayai oleh dana rutin dan dana proyek. Kegiatan ini lazimnya dikenal dengan nama penelitian epigrafi. Seperti diketahui, kegiatan ini menitikberatkan penelitiannya pada prasasti atau naskah yang merupakan tinggalan dari kerajaan-kerajaan yang pernah ada di masa silam. Tinggalan data tekstual di masa lampau, di dalamnya mengandung keterangan-keterangan tentang keadaan sosial ekonomi masyarakat, kepercayaan, agama, adat istiadat masyarakat pendukungnya (lihat foto 1 dan 2).



Foto 1. Tinggalan data tekstual dari batu.

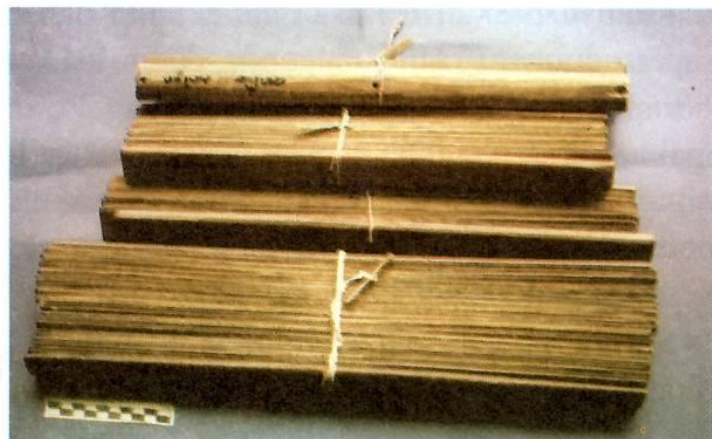


Foto 2. Tinggalan data tekstual dari rontal.

Sesuai dengan sifatnya penelitian tentang data tekstual, di Balai Arkeologi Denpasar dapat dibedakan menjadi dua, yakni penelitian terprogram dan penelitian insidental. Penelitian terprogram ialah kegiatan yang diusulkan oleh peneliti yang ada di lingkungan Balai Arkeologi Denpasar melalui usulan kegiatan, diteruskan kepada Pusat di Jakarta. Setelah melalui penggodokan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, usulan tadi ke luar berupa Daftar Isian Proyek (DIP) dan Daftar Isian Kegiatan (DIK) dengan rincian yang sudah lengkap. Sedangkan penelitian insidental ialah kegiatan penelitian yang tidak direncanakan oleh Balai Arkeologi Denpasar sebelumnya, tetapi biasanya dilaksanakan berdasarkan atas laporan masyarakat, baik melalui telepon, surat undangan, maupun dengan cara menghadap langsung ke kantor.

Di dalam pelaksanaannya, penelitian data tekstual yang terprogram sering dihadapkan dengan beberapa kendala, seperti yang dialami oleh perintis-perintis dalam penelitian prasasti tempo dulu baik oleh peneliti asing maupun peneliti kita sendiri. Kendati di dalam usulannya, peneliti telah mempertimbangkan dengan matang dana, waktu dan perangkat lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana. Pada kenyataannya, usulan yang diajukan oleh peneliti jarang mendapat pendanaan sesuai dengan anggaran yang diajukan. Hal ini akan berdampak pada lamanya waktu pelaksanaan kegiatan, yang pada akhirnya berdampak pula pada hasil penelitian. Kadang-kadang dari pendanaan itu hanya mampu membiayai tahap pengumpulan data di lapangan saja, padahal jika diikuti tahap-tahap penelitian yang semestinya dilakukan, seharusnya pendanaan itu menyangkut pula tahap-tahap berikutnya, seperti tahap analisis (terjemahan dan interpretasi), penggandaan laporan, publikasi, dan seterusnya. Ada kesan, bahwa kegiatan penelitian ditentukan oleh dana yang tersedia, bukan sebaliknya penelitianlah yang menentukan pendanaan.

Kendala kedua yang dialami oleh peneliti ialah pada saat pelaksanaan penelitian di lapangan, di mana pada umumnya data tekstual (prasasti, naskah) masih dikeramatkan oleh masyarakat pemiliknya (*penyungsung*). Dalam kaitan ini, peneliti biasanya dituntut untuk bertindak sangat bijaksana

dalam menentukan jadwal penelitian. Biasanya naskah atau prasasti disimpan di tempat-tempat suci, dan untuk meneliti diperlukan hari-hari baik serta sesajian tertentu sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat. Di sinilah peneliti dituntut untuk mampu menyelaraskan jadwal yang diberikan oleh kantor dengan jadwal yang ditentukan oleh pemilik prasasti atau naskah. Hari-hari yang dipilih biasanya ialah hari *piodalan*, karena pada saat itu prasasti atau naskah itu diupacarai dan diturunkan. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar, penelitian ini dilakukan hanya dalam tempo satu hari kerja. Hal ini menyebabkan peneliti kekurangan banyak waktu, apalagi jarak tempuh tempat penelitian dengan kantor Balai Arkeologi Denpasar, cukup jauh sehingga waktu yang tersedia kebanyakan dihabiskan dalam perjalanan. Jika sudah sampai ditempat penelitian, peneliti kadang-kadang berhadapan dengan naskah atau prasasti yang secara kuantitas cukup besar. Jika dilakukan penelitian secara benar sesuai dengan etika penelitian, hal ini tidaklah mungkin untuk dilaksanakan. Berangkat dari kendala-kendala di atas, biasanya hasil kegiatan penelitian ini kualitasnya sangat jauh dari harapan.

Kegiatan penelitian data tekstual selama ini dilakukan sebagian besar di wilayah Propinsi Bali dan sebagian kecil di Nusa Tenggara Barat (NTB). Disadari bahwa pemerataan kegiatan ini memang belum memenuhi harapan sesuai dengan tujuan pendirian Balai-balai di daerah. Hal ini mungkin disebabkan oleh tidak tersedianya sumberdaya manusia (SDM) yang membidangi bahasa-bahasa daerah di wilayah Nusa Tenggara antara lain seperti Sasak, Sumbawa, Bima, Sumba Flores dan Timor.

C. Beberapa Harapan di Masa Datang

Melihat prospek penelitian data tekstual di wilayah kerja Balai Arkeologi cukup cerah, di masa mendatang tidaklah berlebihan jika diajukan beberapa pengharapan berkenaan dengan kondisi ini.

1. Segi pendanaan untuk kegiatan ini setidaknya diberi kelonggaran sesuai

perencanaan sehingga upaya-upaya untuk menggali potensi wilayah lebih sesuai dengan harapan. Ini perlu ditekankan, agar fungsi Balai Arkeologi sebagai perpanjangan tangan pusat penelitian Arkeologi dapat memberikan kontribusi yang nyata di dalam pembangunan yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan wilayah kerjanya.

2. Kerja sama dengan instansi terkait termasuk Pemerintah Daerah serta pemilik tinggalan prasasti atau naskah terus digalakkan sehingga upaya-upaya untuk menggali nilai-nilai luhur budaya melalui tinggalan arkeologi dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Kegiatan-kegiatan insidental tentang penelitian data tekstual yang dikehendaki oleh masyarakat agar diberikan pendanaan yang memadai sehingga kegiatan ini tidak terkesan tergesa-gesa dan kekurangan waktu. Pada akhirnya apa yang diharapkan oleh *penyungsong* dapat dikabulkan dan dari segi ilmiah memenuhi persyaratan.
4. Untuk dapat melaksanakan kegiatan penelitian data tekstual di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar secara merata, perlu dipikirkan upaya-upaya untuk membekali para penelitiannya dengan bahasa-bahasa daerah yang ada di wilayah kerjanya dengan jalan merekrut tenaga ahli bahasa daerah sesuai dengan yang dikehendaki atau meningkatkan kemampuan tenaga yang telah ada.

BUKU ACUAN

- Agastia, I.B.G., 1982. *Sastra Jawa Kuno dan Kita*, Wyasa Sanggraha, Denpasar.
- Boechari, 1977. "Epigrafi Dan Sejarah Indonesia" Dalam *Majalah Arkeologi*, Tahun I No. 2, Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 1-10.
- Nabilah Lubis, Ma., Dr., 1996. *Naskah, Teks Dan Metode Penelitian Filologi*, Penerbit Forum Kajian Bahasa Dan Sastra Arab IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Sedyawati, Edi, 1991. "Sumbangan Pengetahuan Pernaskahan Bagi Arkeologi Dan Sumbangan Pengetahuan Arkeologi Bagi Pemahaman Teks" Dalam *Naskah dan Kita*, Lembaran Sastra Edisi Khusus, 12 Januari eds. S.W.R. Mulyadi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 29-40.
- Soebadio, Haryati, 1991. "Relevansi Pernaskahan Dengan Berbagai Bidang Ilmu" Dalam *Naskah Dan Kita*, Lembaran Sastra Edisi Khusus, 12 Januari eds. S.W.R. Mulyadi, Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Jakarta, Hal. 1-17.
- Tim Penyusun, 1999. *Metode Penelitian Arkeologi*, Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1992, Tentang *Benda Cagar Budaya*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999, Tentang *Otonomi Daerah*.

Kontribusi Ragam Hias Klasik terhadap Pengembangan Kerajinan Tradisional Bali

I Wayan Badra, Balai Arkeologi Denpasar

I

Bali sebagai daerah destinasi wisata dunia memiliki ribuan pura yang tersebar di seluruh pelosok-pelosok desa. Dari sejumlah pura tersebut, ada yang memiliki peninggalan arkeologis dari masa prasejarah sampai pada masa sejarah. Tinggalan arkeologis tersebut adalah bukti autentik dari hasil kreativitas seniman manusia masa lampau yang diwarisi oleh generasi masyarakat sekarang.

Sejarah telah mewariskan kepada kita, bahwa sebagian besar tinggalan arkeologi yang menjadi kebanggaan masyarakat Bali, ternyata memiliki potensi dan sumbangan yang cukup besar terhadap pengembangan kreativitas karya seni masyarakat Bali dewasa ini. Sebagian besar tinggalan arkeologis sebagai warisan budaya ditemukan tersebar di seluruh pelosok desa di antaranya ada yang terletak di tebing sungai, di kaki gunung atau bukit, di tepi pantai, di tengah sawah atau ladang, di tengah pemukiman, bahkan ada yang terletak dalam hutan. Tinggalan arkeologis sebagai bukti nyata yang dapat mencerminkan aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya, yaitu kehidupan sosial budaya, penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, keterampilan, sistem religi, pola permukiman, organisasi sosial, keadaan lingkungan serta aspek-aspek lainnya (Sutaba, 1991 : 3-9).

Dewasa ini, tinggalan arkeologis mempunyai arti penting bagi para seniman untuk dijadikan objek kreativitas mereka yang dituangkan lewat

seni kerajinan tradisional. Hal ini sangat bermanfaat dan perlu dikembangkan dengan mensosialisasikan dan mengimplementasikan melalui ragam hias kerajinan tradisional.

Ragam hias yang terdapat pada peninggalan masa lampau, khususnya masa klasik, merupakan satu produk unggulan yang cukup signifikan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kerajinan tradisional Bali. Hasil kerajinan ini dapat disaksikan, di daerah Batubulan, Sukawati, Sila Karang, Ubud, Kamasan, dan lain-lain. Hasil kerajinan tersebut terbuat dari berbagai bahan antara lain batu padas, batok kelapa, dan telur ayam. Demikian juga ada seni kerajinan berupa batik painting dan seni lukis. Seni kerajinan ini telah berkembang di Daerah Ubud, Sukawati, dan Kamasan Klungkung.

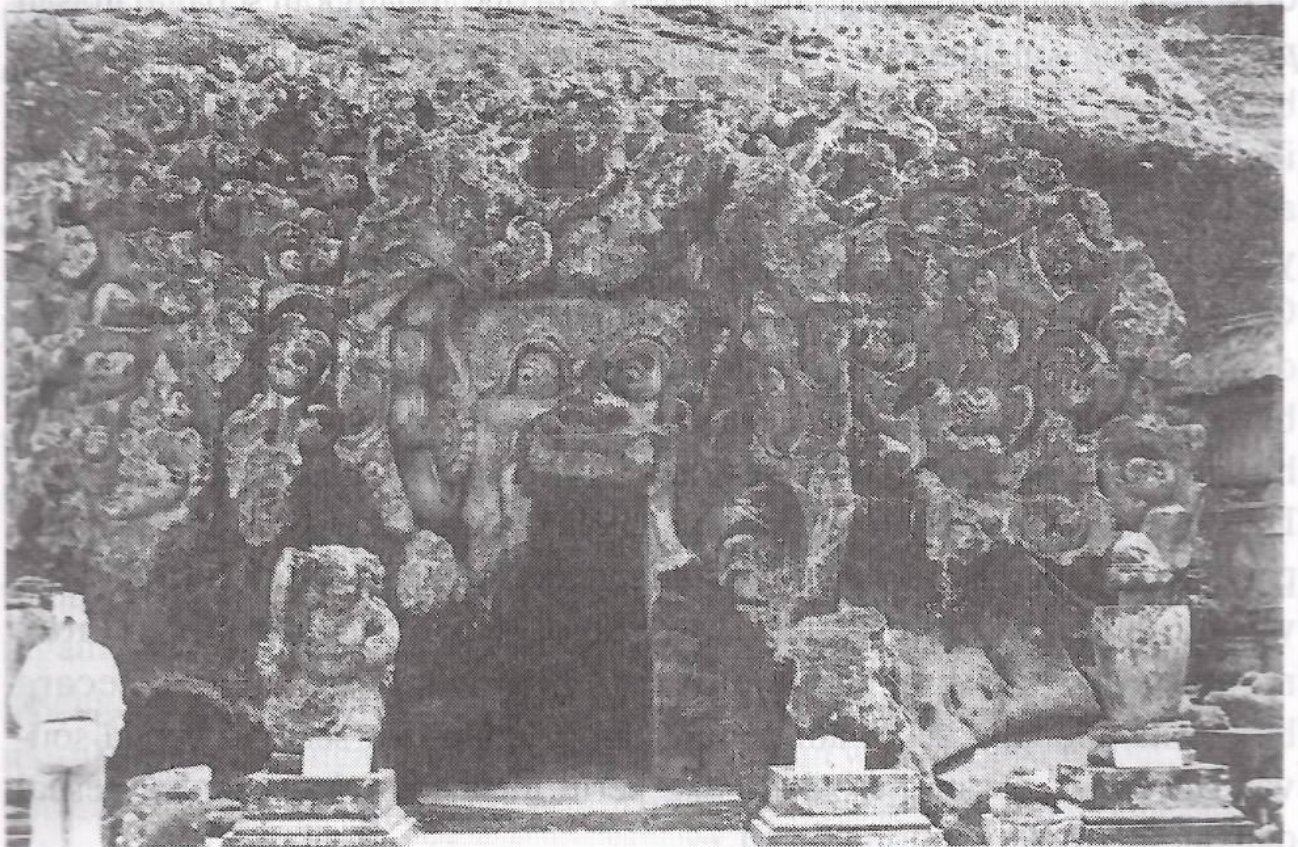
Menyiasati masih berkembangnya unsur-unsur ragam hias ini dalam kehidupan sosial masyarakat Bali, maka timbul keinginan untuk mengetahui sejauhmana keberadaan ragam hias klasik dalam seni kerajinan tradisional dan bagaimana etika penuangan ide karya cipta seni profan dan sakral tersebut. Oleh karenanya unsur budaya ini masih berpengaruh dan cukup signifikan serta eksis dalam tatanan kehidupan budaya masyarakat Bali.

II

Peninggalan masa klasik mempunyai berbagai bentuk ragam hias yang dapat berperan sebagai inspirasi bagi para seniman atau pengrajin di Bali dalam mengembangkan kreasinya, baik dalam bentuk seni pahat atau patung, seni lukis maupun seni batik. Ragam hias kuno memiliki sejumlah motif, banyak ditemukan pada peninggalan arkeologi yang dituangkan dalam bentuk pahatan antara lain : Pura Goa Gajah, Uluwatu, Purasada, Pura Taman Sari, Kerta Gosa, dan lain-lain (Hoop. 1949 : 31).

Sejalan dengan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Bali pada Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya, maka sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah ini adalah memberi promosi dan informasi yang seluas-seluasnya guna melancarkan aspek budaya Bali

terhadap wisatawan. Untuk memantapkan penyebaran informasi agar Bali tetap dapat dijadikan sebagai daerah tujuan wisata, maka secara tidak langsung akan dapat menimbulkan akibat positif bagi prospek pengembangan hasil kerajinan tradisional. Untuk mencapai hal tersebut di atas, maka pendayagunaan atau pemanfaatan ragam hias yang mengandung nilai arkeologi, kiranya dapat disumbangkan dalam pengembangan seni kerajinan tradisional pada masa kini, di antaranya dapat diketengahkan dari hiasan kala Goa Gajah (lihat foto).



Hiasan Kala Goa Gajah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar.

Hiasan Goa Gajah, misalnya dapat dijadikan inspirasi yang diimplementasikan ke dalam lukisan-lukisan maupun pakaian. Demikian pula hiasan muka kala pada candi bentar Pura Sada Kapal dapat dimodifikasikan untuk hiasan bingkai gambar, bingkai foto dan bingkai cermin dari kayu (Kempers, 1960 : 39). Sedangkan motif hiasan wayang pada meru tingkat 11 (sebelas) di Pura Taman Sari Klungkung, sangat baik untuk dijadikan disain lukisan di atas kanvas maupun kain lainnya.

Bentuk pahatan wayang pada panil kuna ini diimplementasikan oleh pelukis maupun perajin di Bali, seperti lukisan gaya Kamasan, Ubud, dan Batuan. Selain itu diharapkan dapat menambah ciri khas hasil lukisannya supaya lebih menarik dan bermutu. Khusus mengenai motif hiasan wayang di Kertha Gosa Klungkung sangat cocok bila dikembangkan sebagai hiasan *prabha* pada bangunan suci maupun bangunan tradisional Bali. Selanjutnya beberapa motif hiasan arca di Pura Kebo Edan, dengan bentuk rambut serba ikal dan hiasan ular yang membelit arca tersebut, dapat digunakan sebagai arca penghias di home stay serta beberapa lokasi wisata. Sejumlah hiasan yang bertemakan pola flora (sulur daun) dapat diambil kekunaan pada Gapura Uluwatu. Ragam hias flora ini terdiri dari sulur daun dan bunga dapat dimodifikasikan sebagai hiasan (disain panil baik skala kecil maupun besar). Selain itu, motif hiasan sejenis ini sangat cocok dikenakan sebagai hiasan kain tradisional Bali, seperti “kain songket” maupun Batik Bali. Dan hiasan semacam ini sekarang telah berkembang dan tertera pada pakaian-pakaian jadi sebagai barang souvenir yang dijual di lokasi objek wisata seperti Ubud, Tanah Lot, Sukawati, dan lain-lain. Untuk mempopulerkan hiasan sejenis ini kiranya perlu upaya secara berkesinambungan ke dalam pembuatan pakaian jadi sebagai benda souvenir di objek wisata purbakala dan perlu mencantumkan gambar sesuai dengan monumen kuno tersebut.

Upaya-upaya semacam ini dapat diharapkan sebagai media penyebaran untuk mengetahui keanekaragaman hiasan kuno maupun pengetahuan mengenai kekunaannya yang dituangkan ke dalam kreasi para seniman di Bali. Dengan adanya ide-ide atau upaya-upaya semacam ini harus mampu

memvisualisasikan, sehingga tampak bobot budaya itu, baik dari sejarah perkembangan maupun bobot benda itu sebagai benda budaya. Pemvisualisasian ini akhirnya mampu memberikan kesan kepada masyarakat, betapa daya cipta kreativitas seniman yang muncul sepanjang perjalanan sejarahnya yang dapat melahirkan benda-benda bermutu tersebut.

III

Kerajinan tradisional (kerajinan tangan di Bali) telah berkembang sejak kedatangan Walter Spies dan Rudolf Bonnet di kancah seni rupa Bali pada era 1920-an itu, yang diyakini sebagai pembawa cahaya baru yaitu janji masa depan dan kemajuan sekaligus menginspirasi, membimbing impian dunia seni rupa Bali ke alam nyata. Harus diakui sejak itu ada perubahan yang cukup drastis dalam seni kerajinan tradisional umumnya dan seni lukis khususnya. Perkembangan seni kerajinan tradisional Bali didorong oleh sistem mata pencaharian sebagian penduduk Bali yaitu bertani. Perekonomian yang bercorak agraris memberikan adanya waktu-waktu luang untuk menumbuhkan seni kerajinan sebagai usaha sampingan. Kadang-kadang di beberapa tempat terutama bagi petani yang tidak mempunyai tanah/sawah, maka hasil usaha dari kerajinan ini menjadi sumber penghidupan mereka (Bagus, 1985 : 146).

Dengan masuknya berbagai unsur kebudayaan luar, maka kerajinan tradisional tersebut mengalami perkembangan bentuk serta ragamnya. Seni ragam, hias, selain berfungsi, sebagai keindahan dekoratif, nilai ekonomis, pelengkap bangunan, juga bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan masuk ke Bali. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan tersebut, maka bermunculan industri-industri kerajinan tangan di rumah-rumah penduduk sebagai home industri. Namun perlu diketahui banyak pula wisatawan tersebut membawa desain sendiri untuk model yang diperlukan dan disenanginya. Dari desain yang mereka pesan ternyata pula merupakan motif-motif yang telah ada di Bali, sehingga si pencipta (seniman) dengan mudah dapat membuatnya. Motif-motif pesanan ini banyak digemari

oleh konsumen lainnya. Perlu juga diketahui di sini, bahwa motif-motif (ragam hias lama) yang mengekspresi keagamaan menjadi modal utama dalam pertumbuhan seni kerajinan tradisional Bali, untuk menuju kepada industrialisasi kerajinan. Segala motif yang ditumbuhkan adalah sikap budaya Bali, sehingga ragam hias itu bernilai, dan bermutu tinggi. Penciptaan ragam hias ini diperlukan tangan-tangan terampil untuk pengembangannya. Si seniman (perajin) untuk menyelesaikan hasil karyanya cukup lama, karena mereka memerlukan inspirasi dan imajinasi, dalam mengawali pekerjaannya sampai selesai. Dengan demikian seni kerajinannya dengan motif kuno dan rumit akan mempengaruhi di samping mereka mempunyai bakat seni, juga mempengaruhi hasil karyanya menjadi terkenal dan dijual dengan harga mahal. Ragam hias dengan desain kuno secara terus menerus diproduksi dan mudah-mudahan tidak menjadi titik kepunahan dalam pembuatannya maupun dari sudut konsumen. Perlu juga untuk diketahui bahwa seniman Bali mempunyai sifat dinamis, fleksibel, pintar mengolah, mempunyai karakteristik, dan pintar mengadopsi.

Si pencipta atau seniman dalam menuangkan ide-ide karya ciptanya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu seni sakral dan seni profan. Seni sakral dapat dikatakan memiliki arti suci, supernatural, power, pantang dilanggar sebab membahayakan karena mempunyai kekuatan (sakti) angker/keramat. Pada dasarnya nilai sakral ini lahir dalam hubungan dengan kegiatan serta sistem kepercayaan di kalangan umat Hindu, sehingga muncul variasi bentuk yang beragam pula. Karakter seni yang bersifat sakral adalah melindungi penderitaan batin seperti ancaman akan wabah penyakit. Selain itu nilai sakral dapat melalui upacara keagamaan dari materi/bahan yang kotor (dianggap tidak berjiwa) setelah benda itu berwujud seni, dihidupkan menurut hukum yadnya atau upakara dan upacara yang akhirnya berstatus berjiwa, hidup, suci, angker dan melindungi apabila diperlakukan baik dan membahayakan apabila tidak diperlakukan secara wajar. Tentang ide di dalam proses cipta mencipta (seni sakral), kedudukannya cukup kuat sebagai pengemban inspirasi, institusi keagamaan (Aryasa, 1993 : 18).

Jadi boleh dikatakan kesakralan itu meliputi segala kehidupan manusia

yang meliputi tempat, benda, ruang, suasana dan waktu. Dengan demikian etika penuangan ide karya cipta seniman, tergantung kepada situasi keadaan setempat (desa, kala, patra). Di dalam menggalakkan dan mendukung kebijakan pariwisata budaya, perlu adanya sikap kehati-hatian dan kesadaran pada insan masyarakat jangan sampai memprofankan yang sakral. Motivasi utama tumbuhnya seni sakral dalam konteks yadnya, dan adanya rasa *ngayah*/pengabdian yang tinggi terhadap agama (Panji, 1983 : 54). Jika seniman, tidak mampu mengekspresikan ide secara total, maka ia belum merasa menyatu dengan masyarakat, lingkungan dan Tuhan. Semua persembahan yang berkaitan erat dengan upacara keagamaan itu, melahirkan seni sakral dalam berbagai bentuknya.

Tata cara penuangan ide karya cipta klasik terhadap seni profan tersebut umumnya tidak ada kendala, dan tidak ada ikatan. Seniman dalam berkarya bebas demi kepentingan konsumen, agar karyanya dapat berfungsi sebagai dekoratif, ekonomis, laku di pasaran untuk kepentingan wisatawan, baik lokal maupun asing. Dengan adanya seni kerajinan profan akan membawa perubahan waktu penciptaan lebih cepat, apalagi manusia (pencipta) sebagai makhluk sosial dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Setiap individu secara kodrati dibekali kemampuan yang berbeda-beda. Apalagi dalam perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dewasa ini bersifat profesional sangat nampak, misalnya dengan memahat/mematung, melukis dan lain-lain orang bisa menjadi jutawan. Kita harus mengakui, bahwa penghargaan masyarakat terhadap seni kerajinan dari masa ke masa turut bergeser dari yang sakral ke profan dan bahkan dari yang berbau religius magis sampai untuk memenuhi tuntutan cita rasa keindahan manusia itu sendiri. Mudah-mudahan dengan adanya hasil kerajinan seni profan tidak membawa dampak yang mengakibatkan punahnya terhadap tatanan kehidupan pencinta seni.

IV

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa ragam hias klasik dapat memberikan kontribusi terhadap seni kerajinan tradisional Bali pada masa

kini dan masa yang akan datang. Dengan adanya ragam hias klasik (kuno), para pencipta (seniman) dapat memberikan rangsangan untuk mendapatkan ide (inspirasi) baru dalam prospek pengembangan ke masa depan yang lebih baik. Selain itu pendayagunaan atau pemanfaatan ragam hias klasik terhadap seni kerajinan tradisional perlu dikoordinasikan dengan baik antarinstansi terkait. Peranan dan fungsi ragam hias selain mempunyai nilai dekoratif, ekonomis, juga untuk kepentingan pariwisata. Demikian pula dari hasil-hasil pengembangan dan pemanfaatan ragam hias klasik tersebut hendaknya dapat digunakan untuk pelestarian peninggalan kuno tersebut. Di samping itu ragam hias yang terdapat pada tinggalan arkeologis keberadaannya cukup signifikan dan dapat memberi ide-ide baru bagi seniman. Dengan demikian etika penuangan karya cipta seniman tercermin dalam seni sakral dan nonsakral.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryasa, I Wayan, 1993. *Materi Pokok Seni Sakral*. Program Pokok Penyetaraan D. II Guru Pendidikan Agama Hindu Sekolah Dasar Departemen Agama, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Buddha, Universitas Terbuka.
- Bagus, I Gusti Ngurah, 1985. *Hubungan Pelukis Rudolf Bonnet Dengan Seniman Bali*, Denpasar Bali. Yayasan Rudolf Bonnet.
- Hoop, A.N.Th.a.Th. van der, 1949/1975. *Ragam-ragam Perhiasan Indonesia*. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Kempers, A.J. Bernet, 1960. *Bali Purbakala*, Petunjuk Tentang Peninggalan-Peninggalan Purbakala di Bali, Disalin oleh Soekmono, Seri Candi 2, Cetakan ke-2, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- Panji, I.G.B.N. 1983. *Seni Sakral Dalam Hubungannya Dengan Agama Hindu*, Orasi Ilmiah Pada Upacara Piodalan Wingsatitama War (Dies Natalis XX) dan Wisuda II Institut Hindu Dharma Denpasar.



Arca-arca Terakota di Kabupaten Klungkung Tinjauan Deskripsi

Oleh Ayu Ambarawati

I. Pendahuluan

Peninggalan berupa arca banyak ditemukan di pura-pura yang ada di Bali, di samping peninggalan lainnya yang berupa sarkofagus, nekara perunggu, miniatur candi dan prasasti. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para arkeolog, Kabupaten Gianyar mempunyai populasi kekunaan yang paling padat jika dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Bali. Temuan itu tersebar di antara Sungai Petanu dan Sungai Pakerisan, Pejeng, Bedulu dan lain-lain. Daerah tersebut oleh para arkeolog dianggap sebagai pusat perkembangan kerajaan Bali Kuna.

Di atas telah disebutkan bahwa peninggalan arkeologi yang berupa arca banyak ditemukan di pura-pura di Bali. Arca sebagai salah satu hasil seni budaya dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu tidak lepas dari unsur-unsur keindahan, religi atau agama. Pembuatan arca dalam agama Hindu memiliki aturan serta ketentuan-ketentuan yang dipatuhi. Dengan adanya aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang telah digariskan maka masing-masing tokoh mudah dikenali (Ambarawati, 2001 : 49).

Penelitian mengenai arca dan benda-benda kuna lainnya telah dilakukan oleh beberapa orang sarjana antara lain Dr. W.F. Stutterheim, Dr. R. Goris, dan Bernet Kempers. Sarjana asing yang pertama mengadakan penelitian adalah Stutterheim dan penelitian difokuskan di pura Penulisan, Kintamani;



Pejeng dan Bedulu. Dari hasil penelitian beliau itu diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *Oudheiden van Bali*. Setelah terbitnya buku itu dalam jangka waktu yang cukup lama penelitian benda-benda arkeologi tidak pernah dilakukan lagi.

Pada tahun 1977 penelitian mengenai arca-arca dan benda-benda kuna lainnya mulai dilakukan oleh Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional (Jakarta) bekerja sama dengan bidang PSK Kanwil Depdikbud Propinsi Bali dan Proyek Penelitian dan Penggalan Purbakala Bali di Pura Penulisan Kintamani.

Penelitian Ikonografi selanjutnya dilaksanakan tahun 1978 - 1979 oleh Proyek Penelitian dan Peninggalan Purbakala Bali bekerja sama dengan Bidang Arkeologi Klasik Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta dan lokasinya di Desa Bedulu. Dipilihnya desa itu untuk mengadakan penelitian ikonografi mengingat Bedulu diperkirakan merupakan bekas keraton (istana) raja Bali Kuna yang disebutkan dalam Kitab Negara Kertagama. Selanjutnya penelitian ikonografi di luar Desa Bedulu dilakukan di desa Buruan, Blahbatuh, Keramas dan Saba.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar bekerja sama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dapat diketahui bahwa arca-arca kuna yang ditemukan sebagian besar tersimpan di pura-pura dan dikeramatkan.

Menurut Stutterhim, peninggalan arca-arca di Bali diklasifikasikan menjadi tiga periodisasi (Stutterheim, 1929 : 133), yaitu :

- Periode Hindu Bali, abad ke 8 - 10 Masehi.
- Periode Bali Kuno, abad ke 10 - 13 Masehi.
- Periode Bali Madya (Pertengahan) abad ke 13 - 15 Masehi.

Periode Hindu Bali, Abad ke 8 - 10 Masehi

Karakter arca dalam periode ini bersikap tenang, badannya kegemuk-gemukan, mata diarahkan ke ujung hidung, dan lemah lembut. Arca-arca yang termasuk pada periode ini ialah arca yang bersifat Budhis, dapat dijumpai dari stupa-stupa tanah liat di sekitar Pejeng, dan arca yang bersifat

Siwaisme yang memperlihatkan gaya yang sama, di antaranya arca Siwa yang tersimpan di Pura Putra Betara Desa. Arca-arca ini sama bentuknya dengan arca-arca di Jawa abad ke 8 sampai dengan abad ke 10, yang termasuk zaman klasik Indonesia yang berpusat di Jawa Tengah (Widia, 1979 - 1980 : 6).

Periode Bali Kuna Abad ke 10 - 13 Masehi

Pada waktu Bali memasuki zaman Bali Kuna, di Jawa terjadi perubahan pusat kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Tinggalan arca-arca dari masa tersebut dalam beberapa hal masih memperlihatkan ciri-ciri Jawa Tengah. Contoh arca dari Jawa Timur misalnya arca Erlangga dari Candi Belahan, sedangkan dari Bali ialah arca pancoran dari Goa Gajah (Kempers, 1959 : 71), sepasang arca berdiri dan berangkat tahun 933 Saka (1011 M), oleh Stutterheim arca ini diduga merupakan perwujudan dari orang tua Erlangga (Stutterheim, 1929 : 133 - 135), arca Siwa yang berangkat tahun 945 Saka (1022 M), arca Durga Mahisasuramardini yang berangkat tahun 948 Saka (1025 M). Arca-arca ini tersimpan di Pura Sibi Agung dan Sibi Alit di Kabupaten Gianyar (Widya, 1979 - 1980: 6-7). Pada periode Bali Kuna kepala arca memakai hiasan (mahkota) berupa susunan kelopak bunga, yang bentuknya makin ke atas makin mengecil dan berkembang sampai zaman berikutnya. Sikap arca berdiri tegak (samabangga), kaku, memakai kain sampai pergelangan kaki. Contoh arca seperti ini dapat diketahui dari arca perwujudan di Pura Penulisan, Kintamani. Di Jawa Timur arca bergaya kekaku-kakuan munculnya kemudian, tepatnya zaman Majapahit (Redig, 1996 : 173).

Periode Bali Madya (Pertengahan) Abad ke 13 - 14

Telah disebutkan di atas, arca yang mempunyai ciri kekaku-kakuan di Bali telah berkembang sejak abad ke-12 hingga abad ke-14, pada periode Bali Madya (Pertengahan) apalagi setelah Bali langsung di bawah pemerintahan Majapahit, kekuasaan Majapahit, yaitu yang membawa pengaruh besar-besaran di Bali terutama dengan adanya perpindahan

penduduk yang membawa serta kebudayaan. Perkembangan seni pada abad 14 - 15 Masehi baik pada seni sastra maupun pada seni arca menjadi dasar pertimbangan seni modern sekarang di Bali (Claire Holt, 1967 : 168).

Selanjutnya pada tahun 1986 hingga sekarang penelitian ikonografi hanya dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar saja. Penelitian ikonografi dilakukan di enam kabupaten di Bali. Dua kabupaten yang belum pernah diadakan penelitian adalah Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Karangasem. Dari enam kabupaten yang sudah pernah diadakan penelitian ikonografi dan benda-benda kuna lainnya hanya di Kabupaten Klungkung yang ditemukan arca terakota. Sedangkan di tempat-tempat yang lain pada saat penelitian belum pernah ditemukan arca-arca yang dibuat dari tanah liat bakar (terakota). Dalam tulisan ini hanya diuraikan arca-arca dari masa klasik yang dibuat dari tanah liat bakar (terakota). Arca-arca yang dimaksud dari masa klasik yaitu arca Catur Muka yang sering juga disebut dengan arca Brahma karena berkepala empat, Ganesa dan arca perwujudan Bhatara.

II. Arca Terakota di Kabupaten Klungkung dan Deskripsinya

1. Di Pura Puseh, Desa Bakas, Banjarangkan

a. Arca Catur Mukha (Arca Brahma)

Arca Catur Mukha ini dibuat dari tanah yang dibakar. Kepalanya tiga buah yang masih utuh dan kepala yang satunya lagi aus. Arca berdiri tegak di atas padmaganda, bertangan empat, dua di belakang dan dua di depan. Tangan kanan belakang memegang bulatan (mungkin kuncup bunga). Jari tangan kanan dan tangan kiri depan aus, tangan kiri dan kanan belakang memakai gelang polos tiga buah. Arca memakai kain sampai di atas lutut dan dihias garis. Memakai sampur diletakkan di samping kiri dan kanan badan. Tinggi arca keseluruhan 60 cm.

b. Arca Perwujudan Bhatara

Arca dibuat dari tanah liat baker, berdiri tegak di atas lapik berbentuk

segiempat. Muka dan tangan aus, kain panjangnya sampai pergelangan kaki.

Tangan kanan dan tangan kiri aus. Stela bentuk segiempat panjang makin ke atas makin kecil. Di samping arca perwujudan bhatara ada juga beberapa fragmen seperti badan, kaki dan kepala yang dibuat dari tanah liat bakar.

2. Di Pura Puseh Manduang, Kecamatan Klungkung

Di Pura Puseh Manduang ini disimpan beberapa buah arca, ada arca yang dibuat dari batu padas dan ada juga arca yang dibuat dari tanah liat bakar. Arca yang dibuat dari tanah liat bakar yaitu :

a. Arca Ganesa

Arca ini dibuat dari tanah liat bakar. Sikap duduk, telapak kaki saling bertemu. Badan agak besar, perut buncit. Belalainya diarahkan ke tangan kiri. Arca memakai gelang lengan hiasan untaian manik-manik. Tangan kanan belakang memegang genitri, tangan kiri belakang memegang kapak, tangan kiri depan memegang mangkuk, tangan kanan depan memegang patahan taring. Memakai gelang kaki dengan hiasan untaian manik-manik. Tinggi keseluruhan 33 cm.

b. Arca Perwujudan Bhatara

Arca dibuat dari tanah liat bakar dan keadaannya sudah sangat aus. Berdiri tegak di atas lapik, mahkotanya kirita makuta dan memakai anting-anting. Jari tangan kanan dan kiri aus, tinggi keseluruhan 47 cm.

3. Di Pura Puseh Selisihan

Dua buah arca Ganesa dibuat dari tanah liat bakar. Di sini hanya dibuat satu deskripsi saja sebab setelah diperhatikan dari segi bentuk, ukuran dan hiasannya keduanya sama. Stela bentuk segi empat, sirascakra dari bunga padma. Muka pecah, belalai pecah, ujung belalai diarahkan ke tangan kiri yang memegang mangkok. Telinga lebar, gelang lengan dengan hiasan bunga. Aribut tangan kiri belakang aus, gelang tangan dua buah polos. Tangan kiri depan memegang mangkuk, tangan kanan depan memegang pisau. Tangan kanan belakang aus, sikap kaki virasana. Tinggi keseluruhan 45 cm.

Selain arca Ganesa, di pura ini juga ditemukan beberapa buah fragmen arca yang terdiri dari kaki, kepala, badan dan tangan yang semuanya dibuat dari tanah liat bakar.



Arca Ganesa dibuat dari tanah liat bakar, di Pura Puseh Selisihan, Klungkung



Arca bhatara-bhatari dibuat dari tanah liat bakar, di Pura Puseh Selisihan, Klungkung

III. Analisis

Penelitian arca-arca terakota di Kabupaten Klungkung yaitu di Pura Puseh Desa Bakas, ditemukan arca Catur Mukha dan arca perwujudan bhatara. Di Pura Puseh Manduang ditemukan arca Ganesa dan arca perwujudan Bhatara, sedangkan di Pura Puseh Selisihan ditemukan arca Ganesa dan beberapa fragmen arca.

Arca Catur Mukha

Arca Catur Mukha (arca Brahma) digambarkan bermuka empat yang menghadap empat penjuru (arah), yang menyatakan empat veda, empat yuga (siklus waktu) dan empat warna (Maswinara, 1999 : 19). Wahana (kendaraan) Dewa Brahma adalah angsa atau kereta (ratha) yang ditarik oleh tujuh ekor angsa. Di samping itu juga dikatakan mempunyai wahana yang berbentuk bunga padma. Sikap tangan Dewa Brahma yaitu abhaya mudra (menentramkan), anjali mudra (memuja) dan varada mudra (memberi anugrah). Atributnya yaitu aksamala (tasbih, genitri), bhiksapatra (piring sedekah), kapala (mangkuk sedekah), lekhani (pena merah), mejabhajan (tempat tirta), padma, pustaka (veda). Di samping itu Dewa Brahma juga memakai atribut angkusa, cakra, danda (pemukul). Nama lain dari Catur Mukha (Dewa Brahma) adalah astakarna (bertelinga delapan), Catur Muka (empat muka), Hansavahana (berkendaraan angsa) (Liebert, 1976; Gupte, 1972: 26-27). Wahana (kendaraan) Brahma adalah angsa yang menyatakan kemampuan, membedakan dan kebijaksanaan.

Arca Perwujudan

Arca perwujudan dalam Bahasa Sansekerta berarti "perwujudan jasmani" yaitu perwujudan dari seorang dewa yang disembah oleh penganutnya untuk tujuan pemujaan. Di Indonesia seorang raja yang wafat akan diarcakan dalam wujud salah seorang dewa dari agama yang dianut semasa hidupnya di dunia ini. Arca yang dibuat dengan tujuan itu dinamakan arca perwujudan (Ayatrohaedi, dkk., 1978 : 18). Ciri-ciri arca perwujudan antara lain kuncup

bunga atau bunga mekar yang dipegang oleh arca itu dan melambangkan pelepasan jiwa atau roh orang meninggal dari hal-hal yang mengikatnya dengan dunia fana (Endagn, 1993 : 16).

Arca Ganesa

Ganesa adalah Dewa Hindu yang dalam mitologi Hindu dikenal sebagai putra Dewa Siwa dengan permaisurinya Dewi Parwati. Dalam mitologi Hindu Ganesa dikenal sebagai dewa kebijaksanaan (dewa ilmu pengetahuan) dan penyingkir rintangan (Sedyawati, 1985 : 21). Di samping itu, Ganesa juga dikenal sebagai dewa pelindung. Oleh karena fungsinya sebagai dewa pelindung maka tidak jarang Ganesa itu ditempatkan pada lereng-lereng yang berbahaya, penyeberangan sungai, pohon beringin, perempatan jalan atau sedapat mungkin arca Ganesa ditempatkan di lembaga-lembaga pendidikan, mengingat arca Ganesa itu dikenal sebagai lambang ilmu pengetahuan dan lambang kebijaksanaan.

Arca Ganesa yang dianggap sebagai lambang kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan ini dapat diketahui dari laksananya yang berupa mangkuk yang dipegang pada tangan kiri depan. Ujung belalainya mengisap air kebijaksanaan yang terdapat dalam mangkuk tersebut. Ini merupakan simbol atau lambang bahwa ia tiada henti-hentinya berusaha untuk mendapatkan kebijaksanaan dan pengetahuan (Wojowasito, 1954 : 141).

Telah disebutkan di atas bahwa di Pura Puseh Bakas, Pura Puseh Manduang dan Pura Puseh Selisihan ditemukan beberapa buah arca seperti arca Catur Mukha, arca perwujudan, dan arca Ganesa. Hal yang sangat menarik dari arca-arca itu adalah bahannya yang dibuat dari tanah liat bakar (terakota) sebagai suatu hal yang berbeda dari arca-arca klasik lainnya. Arca-arca dari masa klasik pada umumnya dibuat dari batu andesit, batu padas, perunggu dan emas. Selama penelitian yang dilakukan di Bali belum pernah ditemukan arca-arca yang berasal dari masa klasik dari terakota.

Terakota merupakan suatu kreasi yang memadukan unsur-unsur alam yaitu tanah, air, angin dan api. Dalam proses penciptaan terakota, keempat unsur itu tidak boleh diabaikan. Satu unsur saja yang ditinggalkan maka

gagallah penciptaan terakota. Terakota secara umum terdiri dari dua jenis produk, yaitu terakota dengan adonan kasar dan terakota dengan adonan halus. Terakota dengan adonan kasar dibuat dari tanah liat diberi tambahan campuran pasir. Sedangkan terakota halus dibuat dari tanah liat tanpa tambahan pasir (Rangkuti, 2001 : 57 - 58).

Kalau diperhatikan arca-arca terakota yang terdapat di Pura Puseh Bakas, Pura Puseh Manduang, dan Pura Puseh Selisihan cara pembuatannya menurut informasi salah seorang pengrajin gerabah bahwa sebelum dibentuk menjadi arca tanah diproses sebagai berikut. Mula-mula tanah dipersiapkan untuk dijemur, selanjutnya tanah itu dicampur dengan serbuk padas. Tanah itu kemudian diberi air secukupnya lalu tanah itu dipadatkan dengan cara dipukul-pukul dengan batu. Setelah itu dibentuk menjadi balok-balok dalam bentuk tertentu sesuai dengan kebutuhan besar kecilnya arca yang akan dibuat. Untuk sementara balok-balok tanah itu didiamkan sampai dalam tingkatan dalam setengah kering kemudian arca dibuat sesuai dengan keinginan lalu arca itu dikeringkan. Setelah dipandang cukup kering kemudian arca itu dibakar sampai memperoleh panas yang cukup matang. Maka warna tanah arca itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan kalau diperhatikan arca-arca terakota yang ditemukan di pura tersebut di atas kebanyakan arca-arca itu sudah retak-retak. Kemungkinan pada waktu pembakaran itu kurang sempurna karena panas yang diperoleh bagian arca-arca itu tidak sama. Karena suhu pembakaran tidak sama itu menyebabkan arca menjadi retak-retak.

IV. Kesimpulan

Dari uraian tersebut di atas, bahwa Pura Puseh Bakas, Pura Puseh Manduang, dan Pura Puseh Selisihan banyak menyimpan arca-arca kuno. Ada arca perwujudan bhatarabhatari, Catur Mukha, Lingga, Ganesa dan fragmen arca yang terdiri dari kaki, badan, tangan dan kepala. Hal yang sangat menarik dari arca-arca ini adalah bahannya yang dibuat dari tanah liat bakar. Namun tidak semua arca yang disimpan di pura itu dibuat dari

tanah liat bakar, ada juga yang dibuat dari batu padas.

Arca-arca yang dibuat dari tanah liat bakar (terakota) itu keadaannya sudah retak-retak. Kemudian pada waktu pembuatan arca-arca itu suhu pemanasannya kurang sempurna yang menyebabkan arca-arca itu menjadi retak. Pada umumnya arca-arca dari masa klasik dibuat dari batu andesit, batu padas, dari logam (emas, tembaga, perunggu). Selama penelitian ikonografi di Bali belum pernah ditemukan arca-arca yang dibuat dari tanah liat bakar (terakota).

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarawati, Ayu, 2003. "Fungsi dan Peranan Arca Dewa dan Arca Perwujudan di Kompleks Candi Wasan, *Forum Arkeologi*, Balai Arkeologi Denpasar.
- Ayatrohaedi, dkk., 1978. *Kamus Istilah Arkeologi*, Jakarta.
- Holt, Claire, 1967. *Art In Indonesia, Continuitas and Carge*, Cornel University Press, Idhaca, New York.
- Kempers, A.J. Bernet, 1959. *Ancient Indonesian Art*.
- Rangkuti, Nurhadi, 2001. "Terakota Masa Sejarah di Indonesia: Fungsi dan Teknologinya" : Berkata *Arkeologi*, ISSN No. 0216 - 1419, Tahun XXI, Edisi No. 1/Mei 2001.
- Redig, I Wayan, 1996. "Ciri-ciri Ikonografis Beberapa Arca Hindu di Bali (Studi Banding Dahulu dan Sekarang), dalam Dinamika Kebudayaan Bali, Upada Sastra, hal.
- Saraswati, Selarti V, 1985. "Temuan Arca Durga Mahisasuramardini dar Kepung, Kediri", dalam Rapat Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi II, Cisarua, 5-10 Maret 1984. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta, hal.
- Slametmulyana, 1953. *Negarakretagama*, dipengaruhi ke dalam Bahasa Indonesia, Penerbit Siliwangi, Jakarta.
- Stutterheim, W.F. 1929. *Oudheiden van Bali I*, Singaradja, Kirtya Liefonck van der Tuuk.

- Sukatno, Endang Sri Hardiati, 1993. *Arca Tidak Beratribut Dewa di Bali, Sebuah Kajian Ikonografis dan Tradisional.*, Program Pasca Sarjana, Universitas Indonesia.
- Widia, I Wayan, 1979 - 1980. *Arca Perunggu Koleksi Museum Bali*, Proyek Pengembangan Permuseuman Bali.
- Wojowasito, 1954. *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jilid III, Cetakan IV, Jakarta : NV. Silingawi.